

LINGKUNGAN

Karhutla Terus Berulang, Kursi Jumhur Hidayat dan Raja Juli Antoni Digoyang

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.30 WIB



JAKARTA – Desakan perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto menguat.

Aliansi Mahasiswa Merdeka meminta Presiden mengevaluasi sekaligus mengganti Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi salah satu sorotan utama dalam tuntutan tersebut.

Desakan itu disampaikan menyusul aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Aksi tersebut mengangkat sejumlah persoalan, mulai dari krisis ekologis, kebijakan ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan kebebasan sipil.

Aliansi Mahasiswa Merdeka menilai evaluasi terhadap jajaran

kabinet perlu menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan.

Mereka meminta Presiden tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi mempertimbangkan pergantian pejabat apabila kinerja kementerian tidak memenuhi tanggung jawab yang diharapkan masyarakat.

Dalam tuntutan tertulisnya, aliansi secara khusus menyebut nama Menteri Lingkungan Hidup

Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai pejabat yang perlu dievaluasi untuk diganti.

Karhutla menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak hanya merusak kawasan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berpotensi menimbulkan ...

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	19
LINGKUNGAN	22
Aneka Berita	25

OPINI

Clandestine Laboratory Narkoba di Pidie: Ujian Kewaspadaan Negara di Gerbang Selat Malaka



IM gabungan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Rabu (21/10/2026) berhasil membongkar salah satu clandestine lab terbesar di Indonesia.

Laboratorium gelap ini berwujud dua unit rumah toko di Desa Beureueh Dua Jalan Piren Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh.

Selengkapnya di halaman 26 »



Selengkapnya di halaman 22 »



NASIONAL

Cium Agenda Tersembunyi, Publik Curiga Jokowi Diam-diam Menjadi Antek Asing



BANDA ACEH - Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ijazahnya kini merambat pada munculnya kecurigaan ber-

skala geopolitik terhadap sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Selengkapnya di halaman 2 »



NACIONAL

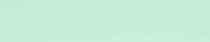
Belajar dari Bung Hatta, Roy Suryo: Tidak Usah Ada Wapres hingga 2029



BANDA ACEH -Roy Suryo menyatakan lebih memilih Indonesia tanpa wakil presiden hingga 2029. Ia menyebut sejarah republik pernah mengalami masa tanpa wapres dan menilai hal itu bisa terulang. Pernyataan ini disampaikan dalam program Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang 28 Oktober 2026.

**Selengkapnya di
halaman 2 »**





Bank Aceh



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

NASIONAL

Cium Agenda Tersembunyi, Publik Curiga Jokowi Diam-diam Menjadi Antek Asing

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.21 WIB



BANDA ACEH - Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ijazahnya kini merambat pada munculnya kecurigaan berskala geopolitik terhadap sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul adanya sekelompok massa yang menggeruduk kediaman Jokowi di Solo. Perwakilan Massa, Bangun Sutoto secara terbuka menyuarakan dugaan mengenai adanya intervensi kekuatan luar di balik ngototnya sang mantan presiden dalam mempertahankan pengaruh Politik dinasti keluarganya dalam pemerintahan dari Prabowo Subianto.

Tuduhan Jokowi diam-diam bertindak sebagai perpanjangan tangan atau 'antek asing' ini didasari oleh rekam jejak sejumlah kebijakan strategis selama dua periode pemerintahannya yang

dinilai lebih banyak menguntungkan pihak luar ketimbang kepentingan kedaulatan nasional.

"Tapi bapak lain daripada yang lain. Kami menduga ada agenda tersembunyi dari negara asing yang masih menghendaki rezim bapak untuk tampil kembali karena kebijakan-kebijakan Bapak yang banyak menguntungkan mereka di saat bapak menjabat sebagai presiden," kata Bangun dikutip Kamis (29/10/2026).

Menurut Bangun, besarnya kepentingan pihak asing untuk mengamankan aset dan kebijakan yang telah disepakati pada era sebelumnya menjadi katalis utama mengapa mantan gubernur tersebut diduga merekayasa konstitusi untuk mendudukkan Gibran di Wakil Presiden. Hal ini membuatnya terlihat sangat berbeda dibandingkan enam presiden sebelum-

nya yang bersedia melepaskan panggung politik sepenuhnya ketika masa jabatan mereka berakhir.

Penempatan Gibran di struktur tertinggi negara dianggap berbahaya jika benar-benar dikendalikan oleh kepentingan eksternal. Bangun menegaskan bahwa saat ini kesadaran masyarakat telah terbangun, terbukti dari masifnya eskalasi tuntutan yang menyuarakan agar wapres terkini segera meletakkan jabatannya.

"Diperparah lagi, saat ini sudah banyak rakyat yang meminta saudara Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri," tandasnya.

Adapun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri dikabarkan perlahan tengah menjauhi sosok dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini salah satunya

ditengarai oleh penyampaian hal berbeda terkait peluang duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029.

Jokowi saat ini mengatakan pembahasan terkait pilpres masih jauh. Padahal sebelumnya ia memberikan arahan kepada relawannya untuk mendukung pemerintahan saat ini berjalan dua periode.

Jokowi menyebut arahan itu sudah ia sampaikan sejak awal. "Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (Prabowo -Gibran 2 Periode)," kata Jokowi.

Namun Jokowi baru-baru ini enggan menjawab ketika disinggung kemungkinan anaknya kembali maju dalam pilpres bersama dengan Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Soal Data Jokowi, Peneliti Dokumen: Kok Selalu Ada Dua?

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.09 WIB

BANDA ACEH - Peneliti dokumen Luke Susilo mempertanyakan perbedaan informasi mengenai pernikahan Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana. "Kok selalu ada dua," kata Luke, merujuk pada dugaan adanya dua versi informasi dalam sejumlah dokumen terkait Jokowi.

Ia menyoroti dua ucapan selamat ulang tahun pernikahan pada 2017 yang mencantumkan usia pernikahan berbeda, serta sebuah foto bertuliskan tanggal "FEB 86" yang menurutnya lebih tepat disebut foto pertunangan atau lamaran.

Hal itu disampaikan Luke saat berbincang dengan Refly Harun dalam podcast di kanal YouTube REFLY HARUN PODCAST

yang tayang pada 27 Oktober 2026.

Luke mengatakan, dua ucapan tersebut diunggah Fajrul Rachman, yang disebutnya sebagai orang dekat Jokowi dan kini menjabat duta besar. Ucapan pertama diunggah pada 30 Agustus 2017, sedangkan ucapan kedua pada 24 Desember 2017.

Menurut Luke, unggahan Agustus masih dapat dilihat hingga kini, sementara unggahan Desember telah dihapus. Ia menduga penghapusan itu berkaitan dengan foto yang menyertai unggahan tersebut.

Luke menyoroti tulisan "FEB 86" di sudut foto yang disebut sebagai foto pernikahan Jokowi

dan Iriana. Berdasarkan penafsirannya, foto itu justru menunjukkan momen pertunangan atau lamaran.

"Foto ini bukan foto pernikahan, tapi foto pertunangan atau foto lamaran," ujar Luke.

Perbedaan lainnya terletak pada usia pernikahan yang dicantumkan dalam kedua ucapan tersebut. Luke mengatakan, unggahan 30 Agustus 2017 menyebut usia pernikahan Jokowi dan Iriana 30 tahun. Sementara itu, unggahan 24 Desember 2017 menyebut usia pernikahan mereka 31 tahun.

Ia menilai perbedaan itu perlu dicermati karena informasi tersebut disampaikan oleh pihak yang menurutnya memiliki latar bela-

kang pendidikan, bukan sekadar buzzer atau akun anonim.

Luke juga membandingkan tanggal pada unggahan kedua Fajrul dengan tanggal pernikahan yang tercantum dalam fotokopi buku nikah yang diunggah PDIP.

Dalam paparannya, ia menyebut 24 Desember 1986 sebagai tanggal pernikahan Jokowi dan Iriana yang tercantum pada dokumen tersebut.

Meski demikian, Luke mengaku belum pernah melihat foto ijab kabul Jokowi dan Iriana yang beredar luas. Menurutnya, foto yang banyak beredar justru merupakan foto pertunangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Belajar dari Bung Hatta, Roy Suryo: Enggak Usah Ada Wapres hingga 2029

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.08 WIB



BANDA ACEH -Roy Suryo menyatakan lebih memilih Indonesia tanpa wakil presiden hingga 2029. Ia menyebut sejarah republik pernah mengalami masa tanpa wapres dan menilai hal itu bisa terulang. Pernyataan ini disampaikan dalam program Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang 28 Oktober 2026.

Pembawa acara menanyakan sikapnya secara langsung, apakah ia lebih memilih tanpa wapres dibandingkan dengan adanya wapres saat ini. Roy menjawab singkat, "Iya." Ketika ditanya alasannya, ia menyebut soal beban biaya.

"Daripada beban. Beban untuk negara ini membiayai Wapres ini kan luar biasa," ujarnya.

Roy mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjalani masa tanpa wakil presiden setelah Mohammad Hatta mundur. Ia menjelaskan bahwa pada 1945 hingga era Republik Indonesia Serikat, Soekarno dan Hatta masih berpasangan.

"Tujuh tahun kemudian tahun 57, itu Bung Hatta dengan kenegawanannya, dengan kelogowannya mengundurkan diri," kata Roy. Menurutnya, setelah itu kursi wapres kosong selama sekitar satu dasawarsa.

"Sehingga selama 10 tahun sampai dengan tahun 67 dan di tengah-tengahnya ada peristiwa G30S/PKI, maka di ruangnya Pak Harto waktu itu hanya ada Bung

Karno, ya, itu memang Indonesia tanpa Wapres," ujarnya.

Ia merujuk pada adegan film G30S/PKI produksi 1984 yang memperlihatkan ruang Kostrad hanya berisi foto Garuda dan foto Bung Karno. "Indonesia kan pernah punya pengalaman tanpa wapres gitu loh," kata Roy.

Dari sisi pembiayaan, Roy mengaitkannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebut pembangunan IKN tidak ada gunanya. "Saya juga sebenarnya sangat melihat itu wah itu apa, muspro, muspro itu enggak ada gunanya, bahkan itu mengganggu perbaikan negara, uang negara," katanya.

Menurut dia, istana wakil presiden di IKN sudah selesai dibangun. Namun ia menilai Gibran tidak berpindah ke sana. Kalaupun berpindah, ia menilai hal itu akan menambah biaya. "Pasti nanti tim suksesnya malah akan banyak, malah pesta-pesta nanti di sana, ngapain juga gitu loh membiayai kegiatan yang enggak ada hubungannya," ujarnya.

Ia menyimpulkan, "Artinya apa? Sudahlah enggak usah ada Wapres."

Roy mengatakan ketiadaan wapres akan menghasilkan penghematan di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. "Penghematan itu akan luar biasa bisa dilakukan di saat kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja sekarang," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Beredar Poster Rapat Pemakzulan Gibran, Ini Kata Yusril

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.27 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal beredarnya poster undangan konferensi pers bertajuk 'Audiensi Persiapan Skenario Pemberhentian Wapres Gibran'.Yusril menegaskan poster tersebut adalah hoaks dan bukan berasal dari pihaknya. Yusril menjelaskan, poster itu mengklaim ada audiensi kepada dirinya namun tanpa pemberitahuan resmi.

"Sebenarnya ingin audiensi kepada saya tapi enggak ada pemberitahuan surat," ujar Yusril di

sela konferensi Hari Sumpah Pemuda ke-98 di gedung Makara UI, Rabu (28/10).

Yusril menegaskan kegiatan tersebut bukan inisiatif dari kementeriannya. Bahkan, alamat kantor yang tercantum dalam poster juga salah.

"Jadi jelas itu bukan inisiatif, bukan dari pihak Kementerian, apalagi alamatnya salah. Kami kan sudah bukan di situ kantornya," tegasnya.

Ia menjelaskan, kantor Kemenko Kumham Imipas sudah pindah ke gedung di depan Gedung Besar Malaysia, bukan di alamat lama yang ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Aktivis 98: Rezim Prabowo Lebih Mengenyangkan Perut Gerombolannya daripada Rakyat

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.28 WIB



BANDA ACEH - Aktivis 1998, Jayadi Santoso, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kelompok yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. “Rezim Prabowo lebih mengenyangkan perut gerombolannya daripada rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran besar, tetapi manfaat dan pengelolannya harus benar-benar diawasi agar tidak lebih banyak dinikmati elite yang dekat dengan kekuasaan,” kata Jayadi Santoso kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).

Menurut Jayadi, besarnya anggaran MBG semestinya diikuti

dengan transparansi, pemerataan manfaat, dan pengawasan ketat. Program yang menggunakan uang negara itu harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima program, bukan menjadi peluang ekonomi bagi segelintir pihak yang memiliki akses Politik.

Ia juga menyoroti dugaan adanya elite politik yang memiliki lebih dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika informasi tersebut benar, menurut Jayadi, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kepemilikan dan pengelolaan unit-unit pelayanan itu dilakukan, termasuk mekanisme penunjukan mitra serta potensi benturan kepentingan. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui data kepemilikan dan dokumen resmi.

Di sisi lain, Jayadi menilai kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok semakin membebani rumah tangga. Ketika harga pangan dan kebutuhan sehari-hari meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah.

“Rakyat tidak bisa hidup hanya dengan janji program besar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kepastian ekonomi. Pemerintah harus menjelaskan langkah konkret untuk mengendalikan harga agar beban hidup rakyat tidak terus bertambah,” ujarnya.

Jayadi juga mengkritik kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor. Ia menilai ketidakpastian kebijakan dan keraguan terhadap arah pengelolaan ekonomi dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menanamkan modal. Meski demikian, klaim bahwa investor beramai-ramai meninggalkan Indonesia perlu diuji melalui data realisasi investasi, arus modal, dan perkembangan penanaman modal asing maupun domestik.

Menurut dia, kepercayaan investor tidak cukup dibangun melalui pernyataan optimistis pemerintah. Kepastian hukum, konsistensi regulasi, pemberantasan korupsi, serta iklim usaha yang sehat juga menentukan keputusan investasi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Wapres Gibran Punya Rahasia di Singapura? Penjemputan Tahun 2014 Lalu Kini Dipertanyakan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.12 WIB

BANDA ACEH - Peneliti dokumen Luke Susilo mempertanyakan cerita bahwa Gibran Rakabuming Raka dijemput dari sekolah di Singapura menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada 2014. Dalam obrolan bersama Refly Harun yang tayang di kanal YouTube REFLY HARUN PODCAST pada 27 Oktober 2026, Luke menilai cerita tersebut perlu diperjelas.

Ia membandingkannya dengan pernyataan Gibran pada masa awal kemunculannya di publik serta sejumlah hal lain yang menurutnya menimbulkan pertanyaan.

Luke mengaitkan persoalan itu dengan pernyataan Andi Widjajanto yang, menurut penuturannya, disampaikan pada September 2026. Luke mengatakan pernya-

taan Andi sempat mendapat sambutan positif dari pendukung Jokowi karena mengaku pernah melihat ijazah asli.

Luke kemudian menirukan cerita tentang persiapan pelantikan Jokowi pada 2014 yang dikaitkannya dengan Andi.

“Saya diminta oleh Mbah Noto untuk memaksa Gibran ini dijemput pulang karena mau pelantikan,” ujar Luke menirukan cerita tersebut.

Ia melanjutkan, “Karena katanya waktu itu Gibrannya ini ada di Singapura. Sehingga dijemputnya di sekolah di Singapura. Padahal 2014.”

Luke juga mempertanyakan respons para pendukung Jokowi terhadap cerita tersebut. Menurut

dia, cerita itu diterima tanpa banyak keberatan.

Luke membandingkan cerita penjemputan tersebut dengan sikap Gibran ketika disebut tidak pernah ikut kampanye ayahnya. Ia menuturkan bahwa Gibran saat itu membantah dengan menyatakan dirinya sibuk bekerja.

“Padahal kan saya kerja, saya sibuk,” kata Luke menirukan ucapan Gibran.

Luke turut menyinggung analisis seorang YouTuber yang disebutnya sebagai QNC. Menurut penuturan Luke, analisis tersebut menyebut Gibran bolak-balik Singapura dan Australia pada 2002 hingga 2010.

Dari situ, Luke mempertanyakan logat Jawa Gibran yang menurutnya masih kental pada 2014.

“Kok tahun 2014 logatnya sekental itu logat Jawanya,” ujar Luke. Ia mengakui bahwa persoalan logat tersebut merupakan bagian dari analisisnya.

Selain cerita penjemputan, Luke menyinggung kemunculan Gibran di hadapan media pada 20 Oktober 2014. Menurut Luke, dalam kesempatan itu Jokowi menyebut usia Gibran 27 tahun, sedangkan Gibran menyebut dirinya berusia 25 tahun.

Luke menilai perbedaan angka tersebut sebagai petunjuk mengenai tahun kelahiran Gibran. Namun, penilaian itu merupakan kesimpulan Luke berdasarkan keterangan yang ia sampaikan dalam diskusi.

NASIONAL

Isu Reshuffle Mencuat! Gerindra Sebut Menteri dari Golkar, PAN, dan PSI Kena

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.49 WIB



BANDA ACEH - Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, Kamrussamad, menyoroti kinerja sejumlah menteri yang dinilainya belum memberikan dukungan memadai terhadap agenda Presiden Prabowo Subianto. Tiga nama yang menjadi perhatiannya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam perbincangan di kanal YouTube Akbar Faizal, Kamrussamad mengangkat persoalan layanan publik, terutama pemadaman listrik yang disebutnya telah berlangsung selama 10 bulan. Menurutnya, gangguan tersebut berpotensi merusak rantai pasok ekonomi di daerah.

tian seluruh partai Politik, bukan hanya partainya sendiri.

“Saya tadi menempatkan kriteria keempat, aspirasi publik. Kalau kami sebagai anggota partai menyerap aspirasi itu, itu harus juga diserap oleh seluruh partai yang ada. Bukan cuma kami,” tuturnya.

Menurut Kamrussamad, gangguan pada rantai pasok dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Kondisi itu juga dinilainya berpotensi mengurangi kepercayaan investor domestik dan global sehingga mereka memilih bersikap wait and see.

“(Itu berkaitan dengan Kementerian Komdigi) sebagai fungsi regulatornya,” tuturnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kamrussamad membahas persoalan judi online dan pinjaman online yang menjerat masyarakat. Ia menilai fungsi regulator Kementerian Komunikasi dan Digital perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menutup akses terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Nama ketiga yang disorot adalah Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Kamrussamad mempertanyakan tindak lanjut atas permintaan Prabowo agar suku bunga pinjaman bagi pelaku UMKM diturunkan, mengingat menurutnya tingkat bunga selama ini masih berada di atas 20 persen.

“Sekarang sudah enam bulan. Kita belum tahu lembaga keuangan mana yang sudah menurunkan suku bunga untuk UMKM menjadi single digit.

“Kementerian teknis yang berkaitan dengan layanan publik, seperti pemadaman listrik yang sudah 10 bulan berjalan. Karena itu bisa merusak rantai pasok ekonomi di daerah-daerah,” kata Kamrussamad, dikutip Kamis (29/10/2026).

Ia menilai pergantian Direktur Utama PLN belum cukup untuk menyelesaikan persoalan karena menteri tetap memiliki peran penting sebagai regulator. Akbar Faizal kemudian menyela pembicaraan dengan menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Maksud Anda adalah Menteri ESDM,” ujar Akbar.

Kamrussamad juga menyoroti polemik bahan bakar minyak (BBM) yang menurutnya dapat mengganggu aktivitas ekonomi daerah. Ia mengatakan keluhan masyarakat perlu menjadi perha-

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Disebut Jadi Kehilangan Terbesar dalam Perjalanan Politik Jokowi, Apa Itu?

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.28 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik Adi Prayitno mengungkapkan hal yang dinilainya menjadi salah satu kehilangan terbesar dalam perjalanan Politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Adi, salah satu kehilangan tersebut adalah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP). Ia berpandangan, jika Jokowi masih menjadi kader PDIP, komunikasi politik dengan partai lain berpotensi lebih mudah dilakukan.

Pasalnya, menurut Adi, para ketua umum partai politik terkesan menjaga jarak dari Jokowi setelah ia lengser dari jabatan presiden. Mereka dinilai tidak terlihat mengunjungi Jokowi secara terbuka di kediamannya di Solo sejak ia tak lagi menjabat sebagai presiden.

“Dan saya selalu membayangkan, tapi kalau Pak Jokowi masih DPDP gampang berkomunikasi dengan partai yang lainnya,” ujar Adi dalam kanal YouTube tvOne-News, dikutip Rabu (28/10).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Viral Teh Botol Sosro Diduga Bercampur Sabun Saat Demo di Bundaran HI

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.25 WIB



BANDA ACEH - Sebuah video yang memperlihatkan dugaan minuman Teh Botol Sosro bercampur zat menyerupai sabun menjadi perbincangan di media sosial. Rekaman tersebut disebut diambil saat aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, dan langsung menarik perhatian warganet. Dalam video yang beredar, seorang pria memperlihatkan kemasan teh kotak yang mengeluarkan busa ketika ditekan. Ia mengaku mencium aroma wangi menyerupai sabun saat membuka kemasan tersebut. Merasa ada sesuatu yang tidak biasa, pria itu memilih untuk tidak meminum minuman tersebut. Ia menduga ada kandungan yang tidak semestinya di dalam produk yang ditemukannya, seperti diku-

tip TribunStyle.com dari YouTube Tribun Sumsel.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam rekaman, minuman kemasan itu ditemukan tergeletak di jalan raya di kawasan Jakarta Pusat. Namun, asal-usul produk serta penyebab munculnya busa dan aroma tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia.

Teh Botol Sosro Beri Klarifikasi

Menanggapi video yang ramai diperbincangkan, manajemen Teh Botol Sosro menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram resmi perusahaan.

Pihak perusahaan menyatakan tengah melakukan investigasi untuk menelusuri kejadian tersebut. Langkah ini dilakukan guna

memeriksa informasi yang beredar dan mengetahui penyebab munculnya dugaan kejanggalan pada minuman dalam video.

Manajemen juga menegaskan bahwa informasi yang diterima akan ditelaah secara cermat dan objektif sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum.

Penyebab Munculnya Busa Masih Ditelusuri

Hingga kini, penyebab munculnya busa dan aroma menyerupai sabun dalam rekaman tersebut masih belum diketahui secara pasti. Belum ada hasil pemeriksaan yang dapat memastikan apakah minuman itu benar-benar tercampur sabun atau zat lainnya.

Karena itu, dugaan yang muncul dalam video perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan yang telah diverifikasi. Rekaman yang beredar di media sosial saja belum cukup untuk memastikan adanya kontaminasi pada produk.

Investigasi dari pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai asal-usul minuman, kondisi kemasan, serta kemungkinan penyebab perubahan yang terlihat dalam video.

Perkembangan kasus ini pun menjadi perhatian publik, terutama terkait keamanan produk minuman kemasan yang beredar di masyarakat. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diperlukan agar persoalan tersebut dapat dijelaskan berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

NASIONAL

Ulama Terawang Nasib Gibran: Ini Enggak Lama Lagi, Insya Allah Paling 2 Bulan Lah

Oleh Redaksi · 29 Okt, 22.02 WIB



BANDA ACEH - Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus dibayangi pusaran polemik dan spekulasi Politik menyusul dugaan skandal terkait dengan dokumen pendidikannya, yang digunakan untuk mencalonkan dirinya di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo (Ustaz Sambo) bahkan mengatakan bahwa polemik tersebut akan membuat politikus itu kehilangan jabatan wakil presiden dalam waktu dekat. Menurutnya, hal tersebut hanyalah persoalan waktu.

“Nah itulah menurut perkiraan saya, dia ini nggak lama lagi. Ini hanya menunggu it's just the matter of time saja,” kata Ustad Sambo dikutip Kamis (29/10/2026).

Ustad Sambo juga tidak ragu untuk mematok target kalender. Ia memprediksi bahwa gelombang tekanan hukum dan politik ini akan mencapai puncaknya hanya dalam hitungan minggu, bukan hingga akhir masa jabatan lima tahunan.

“Oh ini nggak lama, paling 2 bulan lah. Nah, sebelum masuk tahun depan tuh, saya kira ini 'barangnya' udah selesai. Insya Allah,” ungkap Ustad Sambo.

Namun hingga saat ini, belum ada satu pun proses ketatanegaraan formal di tingkat parlemen yang benar-benar memvalidasi bahwa skenario pemakzulan dalam dua bulan ke depan tersebut dapat terealisasi secara konstitusional.

Terbaru, Tim Advokasi Penegak Moral, Etika dan Integritas Bangsa telah mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 12 Oktober 2026. Hal tersebut karena polemik ijazah Wapres Gibran.

Mereka mendesak parlemen mengaktifkan mekanisme konstitusional Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Hal tersebut menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di 6 Oktober 2026.

Dalam sidang sengketa ijazah politikus muda itu, gugatan berujung tidak dapat diterima karena ketiadaan legal standing alias Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Namun fakta persidangan mengungkap bahwa pengadilan tidak menemukan bukti fisik ijazah/sertifikat luar negeri wapres yang setara SMA.

Meski demikian, pengadilan menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran. Hal tersebut karena politikus muda itu telah resmi dilantik sebagai wakil presiden dari Indonesia.

NASIONAL

Demo 28 Oktober Ricuh Dekat Halte Tosari, Polisi Bermotor dan Bertameng Dikerahkan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 18.31 WIB



BANDA ACEH - Aksi demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda dekat Halte Busway Tosari, Jakarta Pusat, ricuh pada Rabu (28/10/2026). Polisi dan massa terlibat ketegangan hingga terjadi aksi saling lempar botol dan pembatas jalan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah massa berusaha bergerak menuju Gedung UOB untuk bergabung dengan elemen mahasiswa yang lebih dulu menggelar aksi. Namun, langkah mereka terhalang barikade polisi bermotor dan bertameng.

Situasi kemudian memanas. Massa dan polisi terlihat berlarian sambil berteriak satu sama lain di sekitar halte.

Ketegangan juga diwarnai aksi saling lempar benda, termasuk botol dan pembatas jalan. Polisi berupaya menghalau pergerakan massa agar tidak bergabung dengan kelompok mahasiswa di depan Gedung UOB.

Hingga berita ini ditulis, situasi di sekitar Halte Busway Tosari masih tegang. Personel kepolisian bersiaga menghadang massa yang berusaha bergerak menuju lokasi demonstrasi mahasiswa.

ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Cabut Gugatan di PTUN, Kubu Mercy Sihombing Siapkan 5 Langkah Hukum Lain

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.45 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum Mercy Sihombing, Denny Indra-yana menyatakan tengah memper-timbangkan langkah hukum lain setelah pihaknya mencabut gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Denny mengatakan, pihaknya masih mengkaji sejumlah jalur untuk mempersoalkan keabsahan riwayat pendidikan Gibran. Langkah ini dapat ditempuh melalui forum Politik maupun proses hukum.

"Kita sedang mempertimbangkan berbagai langkah," ujar Denny usai menghadiri sidang di PTUN Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dia menyampaikan sejumlah opsi yang dipertimbangkan, mulai dari forum politik hingga jalur

peradilan etik, pidana, dan administrasi.

"Peradilan politik ini pemakzulan (impeachment), pemberhentian Saudara Gibran. Yang kedua adalah Peradilan TUN. Yang ketiga adalah Peradilan Etik," kata dia.

Terkait jalur etik, Denny mengatakan pihaknya telah mengajukan aduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurutnya, aduan tersebut masih dalam proses verifikasi.

"Yang keempat adalah Peradilan Pidana. Ada beberapa teman yang sudah mengajukan permohonan peradilan pidana. Yang kelima, kami sedang juga bersurat ke Komisi Ombudsman. Peradilan Administrasi," ucap Denny.

Dia menjelaskan, langkah ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkaitan dengan dugaan

maladministrasi dalam penerbitan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Denny mempersoalkan dokumen pendukung yang menurutnya belum ditunjukkan oleh pihak terkait.

"Kenapa kami ke sana? Karena ya ini mal-administrasi dari kementerian, tidak kunjung menunjukkan bukti-bukti yang mereka punya. Heran juga, kenapa? Kalau mereka yakin surat keterangannya itu dikeluarkan dengan benar, kenapa buktinya tidak ditunjukkan? Dasarnya tidak ditunjukkan? Maka mal-administrasi itu kami bawa ke ORI sebagai peradilan administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, Mercy Sihombing mencabut gugatan terkait suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran dalam perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Pencabutan tersebut disampaikan

dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta yang beragendakan penyerahan bukti, Kamis (29/10/2026).

Denny menyebut pihaknya mencabut gugatan karena menilai tidak ada bukti baru yang disampaikan pihak tergugat. Dia mengatakan, pihaknya sebelumnya telah meminta agar dokumen pendukung penerbitan suket tersebut dilampirkan dalam persidangan.

"Tetapi Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu. Terutama yang kami ingat di MK itu yang sempat agar kami pahami ada tiga," ujar Denny dalam persidangan.

Menurut Denny, tiga dokumen yang dimaksud adalah Certificate of Attendance dari UTS Insearch, transkrip nilai Gibran, dan bukti enrollment ...

NASIONAL

Ternyata Agus Suparmanto dan Taj Yasin Dipecat Gegara Satu Tahun Tak Ngurus PPP

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.31 WIB



BANDA ACEH -Langkah pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030 melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 murni usulan DPW PPP seluruh Indonesia.

"Semua rekan-rekan pengurus wilayah, cabang dan anak cabang kecewa dengan Waketum dan Sekjen DPP PPP yang tak pernah mengurus partai sejak menjadi pengurus," kata Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT), Djainudin Lonek melalui keterangan tertulis, Kamis 29 Oktober 2026.

Djainudin mengatakan bahwa SK Menteri Hukum tentang kepengurusan PPP keluar pada 6 Oktober 2025.

"Artinya genap setahun Agus Suparmanto dan Taj Yasin mangkir dari PPP," kata Djainudin.

Karena itulah, kata Djainudin, sesuai AD/ART PPP, pengurus yang nyata-nyata tidak aktif lebih dari tiga bulan harus dievaluasi dan dicopot jabatannya dan diganti yang lain.

Selain itu, saat DPP PPP dan DPW se-Indonesia menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Makassar Februari 2026 lalu, Taj Yasin bukannya hadir bersilaturahmi dengan kader dan berpikir keras bersama untuk kebangkitan PPP, malah bikin surat ke Kapolda Sulsel agar membatalkan kegiatan tersebut.

"Sungguh tidak masuk akal," kata Djainudin.

Keanehan terbaru, saat struktural PPP bahu membahu menyusun pengurus sampai tingkat desa, tiba-tiba ketua PPP provinsi NTB, Bengkulu dan Banten dipecat Agus Suparmanto yang hanya wakil ketua umum bersama Taj Yasin sekretaris jenderal dan diganti dengan pelaksana tugas.

Pelanggaran yang bulat dan telanjang melampaui wewenang di AD/ART dan penggunaan surat keputusan dan stempel yang tidak sah, jelas-jelas sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi dan mandat partai.

"Tak ada tempat bagi pihak yang hanya membela kemauan pribadinya di partai milik umat," pungkas Djainudin.

Diketahui, keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang dipimpin Ketua Umum PP Muhamad Mardiono Mardiono secara daring pada Selasa 27 Oktober 2026.

Dalam keputusan yang dibacakan pada akhir rapat, PPP menyatakan memberhentikan sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut.

"Rakornas III ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Roy Suryo Beberkan Kebohongan Saksi Maret Samuel Sueken di Sidang Ijazah Jokowi, Apa Saja?

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.19 WIB

BANDA ACEH - Roy Suryo menuding saksi Maret Samuel Sueken menyampaikan sejumlah keterangan bohong dalam persidangan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan itu disampaikan Roy setelah sidang dengan agenda pemeriksaan dua saksi, yakni Maret dan Lechumanan, rampung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (28/10/2026).

Roy mengaku lebih menghormati kesaksian Lechumanan dibandingkan Maret. Dia menilai sikap Lechumanan selama persidangan lebih sopan.

"Lechumanan jauh lebih polite jauh lebih sopan, jauh lebih jujur ya dibandingkan dengan Maret Samuel Sueken yang tadi teman-teman sudah bisa lihat semuanya perilakunya, menuding-nuding teman-teman semua, ya," kata Roy usai persidangan di PN Jaktim, Rabu (28/10/2026).

Roy kemudian membeberkan sejumlah hal yang menurutnya menunjukkan adanya kebohongan dalam keterangan Maret. Salah satunya terkait tautan video yang digunakan sebagai bukti saat Maret melaporkan Roy ke polisi.

Menurut Roy, video tersebut bukan berasal dari sumber asli, melainkan tautan TikTok milik pihak lain yang telah diberi tambahan keterangan. Dia juga mempersoalkan durasi video yang hanya 7 menit 33 detik, sementara acara yang menjadi sumber video berlangsung lebih dari empat jam.

"Kebohongan pertama kan saya katakan, saya dan dia kan mengajukan beberapa link ya, saya tanya, apakah link itu Anda sendiri yang download? Ya. Kemudian tanya, apakah Anda nonton full?" Salah satu acara yang biasanya durasinya itu adalah 4 jam

lebih bahkan kadang-kadang bisa lebih ya," kata Roy Suryo.

"Nah, itu dia hanya download sepanjang 7 menit 33 detik. 7 menit 33 detik digunakan untuk memastikan tindakan saya di situ dan apalagi yang dia download itu adalah URL sampah, link sampah. Itu dari TikTok orang lain, itu sudah ada tambahan caption, bukan asli dari TV yang bersangkutan," ucapnya lagi.

Roy juga mempersoalkan keterangan Maret mengenai pernyataan Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait ijazah Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Mencekam! Kadispar Sultra Dikepung Massa usai Diduga Fitnah Anggota DPR di Medsos

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.14 WIB

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulawesi Utara (Sultra) , Ridwan Badallah, dikepung massa saat tengah bekerja di kantornya yang berlokasi di Jalan Tebaununggu II, Kelurahan Korumba, Kota Kendari, Rabu (28/10/2026).

Kedatangan massa tersebut untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan konten di akun TikTok pribadi milik Ridwan Badallah yang diduga mengandung unsur fitnah terhadap anggota DPR Dapil Sultra, Ridwan Bae.

Suasana di dalam ruangan kerja Kadispar Sultra sempat memanas. Ridwan Badallah bahkan nyaris menjadi sasaran amuk massa yang emosi dengan unggahan video tersebut.

Beruntung, sejumlah orang di lokasi cepat meredam situasi sehingga keributan tidak meluas dan kondisi kembali terkendali.

Usai melakukan dialog cukup alot dengan perwakilan massa, Kadispar Sultra Ridwan Badallah akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada anggota DPR Ridwan Bae.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Denny Indrayana Cabut Gugatan Ijazah Gibran di PTUN

Oleh Redaksi · 29 Okt, 20.05 WIB



BANDA ACEH -Penggugat ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Denny Indrayana mengungkapkan alasan walk out dan mencabut gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Adapun gugatan di PTUN ini terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

Aksi walk out itu disampaikan Denny Indrayana di akun pribadi miliknya di Instagram.

"Hari ini Saya dan Tim Kuasa Hukum mencabut gugatan dan Walk Out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran," tulis Denny, dikutip Kamis (29/10/2026).

Denny mengungkap alasannya walk out karena pihak tergugat yakni Kementerian Pendidikan,

tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang bisa menjadi dasar terbitnya suket untuk Gibran.

Denny pun aneh karena tergugat yakni pihak Gibran keberatan saat timnya mencabut gugatan.

"Setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh ketua majelis, tidak kunjung menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket," tulis Denny.

"Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?" tulis Denny menutup status di akunnya.

Gugatan terhadap suket penyetaraan pendidikan Gibran di PTUN diajukan pada 15 Juli 2026.

Pada kasus ini, pihak penggugat tercatat sebagai PT Mercy Toga Kirana sementara tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdas-men.

Petitusi penggugat yakni meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Surat Keputusan Nomor 9149 itu jadi dasar penilaian administratif yang digunakan KPU RI saat memeriksa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menunjukkan berkas sali-

nan riwayat pendidikan kliennya kepada awak media dan majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dokumen fotokopi berwarna itu dilampirkan dalam berkas jawaban setebal 69 halaman dari pihak Gibran selaku Tergugat II Intervensi.

"Dan kami sudah siap untuk membacakan dan memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dan juga kepada rekan-rekan media sebagai bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming kami sudah lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman," kata Rullyandi usai persidangan

NASIONAL

Sekjend Badan Narkotika China Temui Kapolri, Bahas Jaringan Sabu 1,2 Ton

Oleh Van · 28 Okt, 20.48 WIB

JAKARTA — Pengungkapan laboratorium gelap narkotika di Kabupaten Pidie, Aceh, yang menyita sekitar 1,2 ton sabu kini memasuki babak lanjutan. Kepolisian tidak hanya membidik para pelaku yang terlibat dalam produksi, tetapi juga memburu pihak yang diduga menyediakan modal serta mengendalikan jaringan di balik operasi tersebut.

Langkah itu mengemuka setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pengendali Narkotika China (National Narcotics Control Commission/NNCC), Lan Weihong, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama lintas negara untuk membongkar jaringan narkotika yang beroperasi hingga ke Indonesia.

Dalam keterangannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, Suyudi menegaskan bahwa kolaborasi dengan otoritas China akan terus diperluas. Pengungkapan laborato-

rium di Aceh dinilai bukan akhir dari operasi, melainkan pintu masuk untuk mengejar pihak-pihak lain yang diduga masih berada di balik jaringan tersebut.

Kapolri memastikan penyidik masih mendalami perkara itu, terutama untuk mengidentifikasi pendana dan pihak yang mendukung operasional laboratorium. Aparat juga menelusuri kemungkinan keterkaitan kasus tersebut dengan jaringan narkotika lain yang telah terungkap di kawasan Sumatera.

"Kerja sama dengan China akan berlanjut karena masih ada target-target lain," demikian penegasan Suyudi sebagaimana diberitakan detikNews pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penindakan terhadap pelaku di lapangan belum cukup untuk memutus rantai kejahatan narkotika. Penyelidikan kini diarahkan pada struktur jaringan yang lebih luas, termasuk aliran dana, jalur pengiriman bahan baku, serta pihak-pihak yang

diduga mengatur proses produksi dan distribusi.

Wakil Sekretaris Jenderal NNCC China, Lan Weihong, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap jaringan penyelundupan narkotika cair tersebut telah berlangsung sejak 2025. Informasi awal yang diperoleh otoritas China berkaitan dengan kelompok kejahatan yang diduga mengirimkan narkotika cair dari kawasan Myanmar, Thailand, dan Laos ke Indonesia.

Dalam keterangannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, Lan menjelaskan bahwa penyelidikan intensif selama sekitar satu tahun membantu otoritasnya memetakan aktivitas kelompok tersebut. Pengiriman narkotika cair ke Indonesia disebut telah dilakukan berulang kali sebelum laboratorium di Aceh berhasil dibongkar.

Informasi intelijen itu kemudian disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) RI pada September 2026.

NASIONAL

Teriakan Revolusi, Mahasiswa Paksa Terobos Barikade Polisi untuk Bisa ke Bundaran HI

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.19 WIB



BANDA ACEH - Ratusan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa mencoba untuk menerobos barikade aparat kepolisian, dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (8/10). Massa aksi terlihat bersitegang dengan aparat kepolisian yang melakukan penjagaan.

Pantauan JawaPos.com, massa meneriakkan yel-yel revolusi sebagai bentuk perlawanan dalam aksinya, sambil mencoba menerobos barikade aparat kepolisian untuk bisa sampai ke Bundaran Hotel Indonesia. Sebab, kini mereka tertahan di depan Gedung UOB, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Namun, pihak kepolisian juga tampak tak goyah dan tak membiarkan massa maju lebih lanjut ke arah Bundaran HI.

NASIONAL

Hashim Wanti-Wanti Rupiah Bisa Tembus Rp21.000 per Dolar AS

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.37 WIB



BANDA ACEH -Ketua Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo mewanti-wanti Rupiah bisa tembus Rp21.000 per Dolar AS jika persoalan transparansi pasar modal yang disorot Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak segera dibenahi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto itu bahkan menyebut Rupiah bisa semakin lemah jika investor asing menarik dananya dari pasar saham Indonesia.

"Ini masalah sangat-sangat serius. Kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, Rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20.000 sampai Rp21.000, bahkan ada yang bilang Rp22.000 per Dolar AS," kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026.

Hashim mengatakan, praktik goreng saham menjadi salah satu persoalan serius yang harus segera dihentikan. Praktik tersebut dinilai dapat merusak kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Ia pun telah mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo untuk membantu mengantisipasi ancaman penurunan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market oleh MSCI.

Menurut Hashim, persoalan yang menjadi sorotan antara lain

saham dengan porsi kepemilikan publik (free float) terbatas, tetapi memiliki rasio harga saham terhadap laba bersih (Price to Earnings Ratio/PER) yang sangat tinggi.

"Ini adalah kalau free float-nya terpankas, Price to Earnings Ratio-nya gila-gilaan, tidak masuk akal, ini yang dipersoalkan," kata Hashim.

Ia juga mengingatkan pelemahan Rupiah berpotensi menambah beban pembayaran utang luar negeri pemerintah dan menimbulkan persoalan serius bagi perekonomian nasional. Untuk itu, Hashim meminta para anggota Kadin tidak ikut terlibat dalam praktik goreng saham yang dapat merusak kredibilitas pasar modal Indonesia.

"Maka saya minta kawan-kawan dari Kadin, mohon kegiatan kegiatan goreng-gorengan itu dihentikan. Mohon dengan sangat praktik goreng-gorengan segera dihentikan," tegasnya.

Hashim mengingatkan, persoalan tersebut harus segera dituntaskan agar pelemahan Rupiah tidak berujung pada dampak Politik yang merugikan.

"Jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Jangan sampai kawan-kawan Kadin juga ikut dengan praktik-praktik goreng-gorengan. Ini masalah amat sangat serius. Jangan sampai Rupiah jadi Rp21.000, Rp22.000, ini jadi punya dampak politik yang luar biasa negatif," pungkasnya

NASIONAL

Roy Suryo soal Jaksa Panggil Jokowi ke Sidang: Sangat Ditunggu-tunggu Seluruh Masyarakat

Oleh Redaksi · 28 Okt, 18.35 WIB

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo. Jokowi dijadwalkan hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Kamis (5/10/2026).

Merespons kehadiran Jokowi, Roy mengapresiasi sikap majelis hakim PN Jaktim yang dianggap proaktif dalam menghadirkan Jokowi ke persidangan. Menurutnya, kehadiran Jokowi ke ruang sidang juga sangat dinantikan seluruh rakyat Indonesia.

"Sangat ditunggu-tunggu seluruh masyarakat Indonesia karena kami sudah terus mengingatkan agar dihadirkan satu, ijazah yang disebut-sebut asli ijazah; yang

kedua, dihadirkan orang yang didaftar saksi itu nomor satu, yaitu Joko Widodo," ucap Roy usai persidangan di PN Jaktim, Rabu (28/10/2026).

"Poin penting saya kira ini semua ditunggu oleh semua semua apa, teman-teman, termasuk semua media dan rakyat Indonesia," tuturnya.

Dia juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi Presiden ke-7 RI tersebut di ruang sidang.

"Ga ada lah (persiapan khusus), biasa, memang Jokowi siapa," kata dia.

Sementara itu, Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun mengaku akan mewaspadai sebuah strategi dalam persidangan yang akan merugikan pihaknya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Demo Mahasiswa Trisakti di Patung Kuda: Dua Tahun Tanpa Kabar Baik dari Rezim Prabowo

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.58 WIB



BANDA ACEH - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10) sore.

Kedatangan massa ini membawa gelombang protes keras, salah satunya dengan menyerukan narasi bahwa selama dua tahun terakhir tidak ada berita baik dari rezim pemerintahan saat ini.

Hal ini disampaikan salah satu orator di atas mobil komando menyoroti persoalan bencana alam di Sumatra dan Kalimantan yang dinilai belum tuntas ditangani.

"Cukup dua tahun tak ada berita baik dari rezim ini. Bencana alam, sumatera kalimantan belum selesai (ditangani)," ujar orator wanita diatas mobil komando, Kamis (29/10).

Oleh karena itu, lanjut dia, mahasiswa sebagai agen perubahan tidak boleh berhenti bergerak dan bersuara melawan ketidakadilan.

Sebab, kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini, sangat mempengaruhi kondisi masa depan.

"Kita merupakan agent of change, kita masih memiliki jalan panjang. Jangan sampai boomer itu merusak jalan panjang kita," tambahnya.

Soroti Ketimpangan di Kalimantan

Senada dengan hal tersebut, Deva, orator lainnya, menyoroti ketimpangan energi di wilayah penghasil sumber daya alam.

Ia mengungkapkan bahwa Kalimantan yang memiliki tambang terbesar di Indonesia, namun pasokan listrik justru dipadamkan secara bertahap.

"Apa ini yang dinamakan merdeka," tegas Deva di atas mobil komando.

Ia juga mendesak agar publik tidak berhenti menyuarakan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Deva pun mempertanyakan apakah nantinya hutan yang terbakar akan berubah menjadi kebun sawit.

"Apakah lahan itu akan kembali jadi hutan atau berubah menjadi kelapa sawit atau tambang teman-teman. Pulihkan hutan Indonesia," katanya.

Ia juga menilai pemerintah abai dengan penderitaan masyarakat Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga

tidak bisa bersekolah akibat kabut asap.

Bentangkan Bendera Kritik dan Suarakan Tritura

Di tengah kerumunan aksi, massa tampak membawa sejumlah atribut unjuk rasa yang mencuri perhatian.

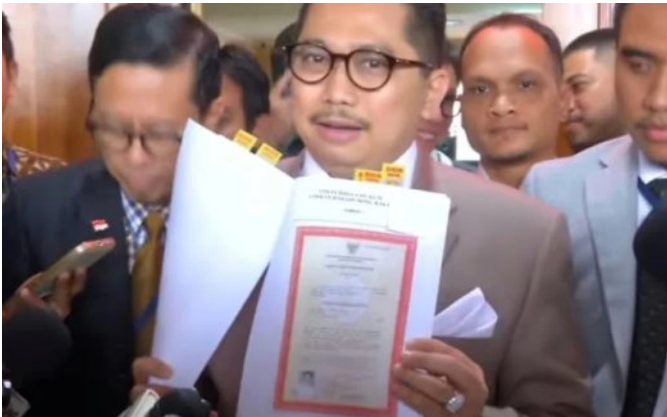
Mereka membentangkan bendera berlatar hitam dan putih yang menampilkan siluet gambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lengkap dengan kalimat bernada kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah.

Spanduk besar bertuliskan "Bismillah Ini Adalah Kegelapan" serta "Dengan nama tuhan ini adalah kegelapan" turut dibentangkan di tengah kerumunan massa.

NASIONAL

Pengacara Pamer Ijazah Gibran dari SD hingga S1 Dilampirkan dalam Jawaban di PTUN

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.34 WIB



Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menunjukkan salinan ijazah kliennya mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1) kepada wartawan se usai menjalani persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.

Dokumen tersebut diperlihatkan satu per satu sebagai bagian dari penjelasan tim kuasa hukum mengenai riwayat pendidikan Gibran yang telah dilampirkan dalam jawaban tertulis kepada majelis hakim.

"Kami sudah siap untuk membacakan dan memperlihatkan di hadapan majelis hakim dan juga kepada rekan-rekan media sebagai bentuk keterbukaan kami kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa riwayat pendidikan dari Bapak Gibran Rakabuming sudah kami lampirkan dalam jawaban kami setebal 69 halaman," kata Rully.

Ia kemudian memperlihatkan sejumlah dokumen yang disebut sebagai bagian dari riwayat pendidikan Gibran.

Dokumen tersebut antara lain ijazah sekolah dasar, ijazah sekolah menengah pertama, sertifikat pendidikan O-Level di Singapura, Certificate of Attendance dari UTS Insearch di Australia, serta dokumen Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore (MDIS) Singapura.

Rully juga menunjukkan dokumen terkait pendidikan Gibran di University of Bradford yang tercantum dalam berkas jawaban pihaknya.

Ia menegaskan, dokumen-dokumen tersebut telah dimasukkan ke dalam sistem administrasi perkara elektronik pengadilan dan disampaikan kepada pihak pengugat.

"Di dalam jawaban ini sudah kami serahkan kepada Majelis. Sudah kami upload di sistem e-Court dan kami sampaikan visinya juga kepada penggugat," kata Rully.

Rully menilai penyampaian dokumen tersebut sebelum agenda pembuktian menunjukkan keseriusan pihaknya dalam menghadapi gugatan yang diajukan Mercy Sihombing terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

"Rekan-rekan media, ini sudah kami insert semua ijazahnya dalam jawaban. Artinya, ini bisa diakses semua oleh penggugat sebelum sidang hari ini digelar," kata Rully.

Ia menambahkan, pihaknya akan menghadirkan dokumen asli pada tahap persidangan yang sesuai dengan agenda pembuktian.

"Nanti akan kita hadirkan aslinya semua, karena dalam hukum acara semua yang asli itu harus dilampirkan, wajib dilampirkan," demikian Rully.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

417 Siswa Diduga Keracunan MBG di Bogor, Puskesmas Dibuat Sesak

Oleh Van · 28 Okt, 20.38 WIB

Bogor — Sebanyak 417 siswa keracunan MBG Bogor masih dalam penanganan tenaga kesehatan pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Para siswa berasal dari tiga SMP negeri di Kecamatan Dramaga dan diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi atau Jaro Ade turun langsung memantau penanganan korban di Puskesmas Cangkura-wok, Dramaga.

Ia menyebut pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk menangani ratusan siswa tersebut.

Wabup Bogor Ungkap Kondisi 417 Siswa

Jaro Ade mengatakan dirinya menerima laporan dari Camat

Dramaga pada Selasa pagi. Setelah berkoordinasi dengan Bupati Bogor, ia mendatangi lokasi untuk memastikan para siswa mendapatkan penanganan.

"Jumlah totalnya 417 dari SMP 1, SMP 2, dan SMP 3. Ada beberapa yang sudah kembali ke rumah, ada yang ke rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya bisa ditangani dengan baik," kata Jaro Ade.

Korban berasal dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 3 Dramaga. Sebagian siswa menjalani perawatan di puskesmas, sementara lainnya dirujuk ke rumah sakit.

Sejumlah fasilitas kesehatan yang menangani korban antara lain Puskesmas Cangkurawok, Rumah

Sakit Karya Bhakti Pratiwi, dan RS Medika Dramaga.

Siswa yang kondisinya dinyatakan membaik oleh tenaga medis diperbolehkan pulang.

Penyebab Keracunan MBG Masih Diselidiki

Dugaan keracunan muncul setelah para siswa mengonsumsi menu MBG pada Senin, 26 Oktober 2026. Namun, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan.

Jaro Ade menegaskan pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui sumber masalah. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan apakah penyebabnya berasal dari makanan, bumbu, atau faktor lain.

"Untuk indikasi keracunan, tentu ini masih harus kita pastikan. Kita sedang melakukan uji laboratorium dan menunggu hasilnya, apakah indikasinya dari makanan, bumbu, atau dari apa," jelasnya.

Sambil menunggu hasil pemeriksaan, pemerintah daerah bersama petugas kesehatan dan kepolisian melakukan pemantauan terhadap para siswa.

Posko kesehatan juga dibuka di sekolah terdampak untuk menerima laporan tambahan.

Pemerintah Antisipasi Korban Belum Terdata

Pemkab Bogor turut mengantisipasi kemungkinan adanya siswa yang mengalami gejala tetapi belum mendapatkan penanganan medis.

NASIONAL

Demo di Palopo Sandera Truk Kontainer untuk Orasi, Mahasiswa Desak Menhut Mundur

Oleh Redaksi · 28 Okt, 18.39 WIB

BANDA ACEH - Sejumlah mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar demonstrasi dengan menjadikan truk kontainer sebagai panggung orasi, Rabu (28/10/2026). Mereka menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus mendesak pemerintah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Aksi pertama dilakukan Gerakan Aktivis Mahasiswa Luwu Raya di gerbang masuk Kota Palopo. Massa menyandera sebuah truk kontainer untuk dijadikan panggung menyampaikan aspirasi.

Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Menteri Kehutanan mundur dari jabatannya. Mereka menilai pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan kebaka-

ran lahan yang menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia dan negara tetangga terdampak kabut asap.

"Kami membawa tuntutan mengenai kebakaran hutan dan lahan," kata Juna, salah satu mahasiswa di lokasi.

Sebagai bentuk protes, massa juga membakar ban bekas dan mengecat tubuh mereka dengan warna merah.

Aksi mahasiswa lainnya digelar oleh kelompok yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di perempatan Kantor Wali Kota Palopo. Mereka menyoroti persoalan pendidikan, terutama nasib guru honorer dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Nasib Laporan Airlangga di Bareskrim Menggantung! 26.415 Kontainer Dibebaskan, Publik Menanti Kejelasan

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.26 WIB



BANDA ACEH – Laporan dugaan kejanggalan pelepasan 26.415 kontainer impor yang menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menyisakan pertanyaan: sejauh mana penanganan perkara tersebut berjalan, dan apa hasil penyelidikan-nya?

Laporan yang dilayangkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Rakyat (AMPERA) ke Bareskrim Polri pada Jumat (9/8/2024) itu menyoroti kebijakan pembebasan ribuan kontainer yang sebelumnya tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya.

Kebijakan tersebut diumumkan pada Mei 2024, ketika Airlangga menjabat Menko Perekonomian, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. AMPERA menduga terda-

pat kejanggalan dalam proses pelepasan kontainer tersebut dan meminta aparat penegak hukum menelusurinya.

Koordinator AMPERA, Ali Hasan, menyatakan laporan itu dilayangkan karena pihaknya mencurigai adanya kemungkinan penyalahgunaan kebijakan oleh pihak-pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

"Kita laporkan Airlangga ke Bareskrim Polri diduga ada permainan kotor para importir dan Menko Perekonomian sehingga barang-barang impor tersebut bisa dibebaskan masuk," kata Hasan di Bareskrim Polri, Jumat (9/8/2024).

Perbedaan Data Kontainer Jadi Sorotan

Hasan mempertanyakan perbedaan jumlah kontainer yang disebut tertahan sebelum kebijakan

pelepasan diberlakukan. Menurut dia, pada 16 Mei 2024, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bahwa jumlah kontainer yang tertahan sekitar 4.000 unit.

Namun, dalam kebijakan pelepasan berikutnya, jumlah kontainer yang dibebaskan mencapai 26.415 unit. Perbedaan angka tersebut menjadi salah satu dasar kecurigaan AMPERA dan dinilai perlu dijelaskan melalui pemeriksaan dokumen serta mekanisme pengambilan keputusan.

"Yang anehnya lagi, pada dua hari sebelum pelepasan, tepatnya pada 16 Mei 2024, Dirjen Bea Cukai melepas 4.000 kontainer, tapi pada saat pelepasan kok jadi berlipat ganda yang dilepas. Makanya kami menduga kuat ada yang memanfaatkan kebijakan agar kontainernya juga bisa keluar," tegas Hasan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Mengaku Imam Mahdi, Pria di Bangkalan Diduga Tipu Pengikut hingga Rp1,3 Miliar

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.10 WIB

BANDA ACEH – Seorang pria berinisial FF, warga Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan pemerasan terhadap sejumlah pengikut-nya. Korban mengaku mengalami kerugian hingga Rp1,3 miliar.

Kasus ini mencuat setelah seorang warga bernama Halimi melaporkan FF ke Polres Bangkalan pada Rabu (21/10/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyerahan uang secara bertahap kepada terlapor.

Kuasa hukum korban, Jailani Muhtadi, mengatakan FF diduga mengaku sebagai Imam Mahdi untuk mendapatkan kepercayaan para pengikutnya.

Menurut Jailani, korban mengaku diminta menyerahkan uang dengan berbagai alasan, mulai dari penebusan dosa, perpanjangan usia atau top up umur, hingga janji keselamatan bagi diri sendiri dan anggota keluarga.

Selain itu, terdapat dugaan permintaan uang untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai tokoh spiritual. Kuasa hukum korban menduga permintaan tersebut memanfaatkan ketakutan dan keyakinan para pengikut.

Kasus ini diduga tidak hanya dialami Halimi. Belasan pengikut lainnya disebut mengalami kejadian serupa dengan nilai kerugian yang berbeda-beda.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyoroti kasus tersebut.

Masyarakat diingatkan agar lebih berhati-hati terhadap klaim keagamaan yang digunakan untuk meminta uang atau menjanjikan keselamatan.

Sementara itu, Polres Bangkalan telah menerima laporan korban dan masih mendalami dugaan penipuan tersebut. Pada Selasa (27/10/2026), penyidik memeriksa tiga saksi untuk mengumpulkan keterangan terkait perkara itu.

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. Dugaan penipuan dan pemerasan yang dilaporkan terhadap FF belum terbukti secara hukum dan masih harus dibuktikan melalui proses peradilan

NASIONAL

Sidang Roy Suryo Memanas! Refly Harun Emosi dengan Saksi: Sangat Tidak Sopan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 15.57 WIB

BANDA ACEH – Sidang kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memanaskan ketika tim hukum terdakwa Roy Suryo menganggap saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Maret Samuel Sueken tidak sopan dalam persidangan. Tim kuasa hukum Roy Suryo awalnya meminta saksi agar menjawab sesuai pengetahuannya.

Namun, saksi tersebut memberikan jawaban yang dinilai tidak sopan.

"Nggak usah ajarin saya jawaban saya, Bos!" jawab Maret di Pengadilan Negeri Jakarta ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Panas! Dokter Tifa-Ade Darmawan Debat soal Ijazah Jokowi di Sidang, Hakim Turun Tangan

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.16 WIB



BANDA ACEH – Suasana sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memanaskan ketika terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mencecar saksi Ade Darmawan terkait berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekaman tayangan talkshow di salah satu stasiun televisi, Kamis (29/10/2026).

Perdebatan berfokus pada perbedaan dokumen fisik ijazah Jokowi dan citra digital yang ditampilkan di layar televisi.

Perdebatan berulang kali terjadi hingga majelis hakim turun tangan untuk menjaga jalannya persidangan tetap kondusif.

Dokter Tifa mengawali pemeriksaan dengan merujuk BAP halaman 5 bagian C, yang memuat keterangan saksi terkait video di kanal YouTube salah satu stasiun televisi. Saat ditanya mengenai tanggal penayangan acara tersebut, Ade mengaku tidak mengingatnya secara pasti. Namun, dia memastikan video itu merupakan tayangan yang pernah disaksikannya.

Pemeriksaan kemudian berlanjut dengan pemutaran rekaman video. Setelah tayangan diputar, Dokter Tifa meminta mengonfirmasi Ade terkait profesinya yang diperkenalkan oleh presenter dalam acara tersebut.

"Berarti Anda tahu, ya, tahu atau tidak bahwa saya diundang sebagai dokter neurosains?" tanya Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

"Jelas," jawab Ade.

Dokter Tifa selanjutnya menanyakan pemahaman Ade menge-

nai Undang-Undang Pers Pasal 5 ayat 1 sampai 3, yang mengatur kewajiban pers menghormati hak jawab dan hak koreksi. Ade menyatakan mengetahui ketentuan tersebut.

Ketegangan berlanjut ketika persidangan membahas transkrip tayangan pada menit ke-7:54. Ade mengonfirmasi kutipan pernyataan Dokter Tifa yang tercantum dalam BAP.

"Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Jokowi yang menjadi presiden periode 2014-2024, maka ini adalah palsu," demikian kutipan pernyataan yang dikonfirmasi Ade.

Dokter Tifa kemudian mempertanyakan apakah objek yang ditampilkan dalam tayangan tersebut merupakan dokumen ijazah fisik atau hanya citra digital.

"Apakah Anda tahu bedanya antara foto digital atau citra digital, integritas digital, benda digital, dengan ijazah?" tanya Dokter Tifa.

"Tidak tahu," kata Ade.

Dokter Tifa lalu menunjukkan contoh dokumen fisik sebagai ijazah untuk menjelaskan perbedaan antara dokumen asli dan visual yang ditampilkan di layar. Namun, Ade tetap berpendapat tayangan tersebut memperlihatkan objek dengan tulisan ijazah.

Perdebatan antara Dokter Tifa dan Ade berulang kali membuat suasana sidang riuh. Majelis hakim akhirnya menengahi keduanya dan mengingatkan agar pertanyaan yang membutuhkan penjelasan teknis maupun penafsiran hukum ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Jokowi Dihadirkan ke Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa 5 November 2026

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.00 WIB

BANDA ACEH – Jaksa Penuntut Umum (JPU) akhirnya menjalankan pemanggilan terhadap saksi pelapor yakni Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke persidangan kasus tuduhan ijazah palsu pada 5 November 2026. Hal itu disampaikan JPU sebelum persidangan terdakwa Roy Suryo ditutup majelis hakim, Rabu (28/10/2026).

"Mohon izin Yang Mulia, kami akan melakukan pemanggilan ter-

hadap saksi atas nama Ir H Joko Widodo dan Syarif Muhammad Fitriansyah," kata JPU di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Namun, JPU meminta majelis hakim agar kehadiran Jokowi di PN Jaktim juga sekaligus menjadi saksi atas terdakwa lain yakni Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

PKN Tolak Pemakzulan Gibran di Luar Jalur Konstitusi, Sentil Standar Ganda Parpol

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.30 WIB



BANDA ACEH - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menolak upaya pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka apabila tidak dilakukan melalui mekanisme konstitusional. PKN menegaskan, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus diselesaikan berdasarkan hukum dan ketentuan konstitusi.

Ketua Umum PKN I Gede Pasek Suardika menyatakan, penolakan terhadap upaya pemakzulan di luar jalur konstitusional bukan berarti partainya memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Pasek, PKN memiliki sikap Politik yang berlandaskan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Mengingat, dalam Pil-

pres 2024 partainya tidak mengambil keputusan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Posisi PKN bertumpu pada prinsip yang lebih mendasar, hasil kedaulatan rakyat harus dihormati dan setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah," kata Gede Pasek kepada wartawan, Kamis (29/10).

Pasek menilai, hasil pemilu yang telah menjadi keputusan rakyat harus dihormati. Apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan pemilu, penyelesaiannya tentu harus ditempuh melalui perbaikan regulasi.

PKN mengingatkan agar ketidakpuasan terhadap situasi politik tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur konstitusional. Bagi PKN, demokrasi tidak

hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan yang menjadi landasan kehidupan bernegara.

Pasek juga meminta partai-partai politik agar tidak menerapkan standar ganda dalam menyikapi hasil pemilu. Menurutnya, partai politik tidak seharusnya menikmati keuntungan dari proses demokrasi, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi manuver politik yang dapat mengganggu legitimasi hasil pemilihan.

"Demokrasi membutuhkan konsistensi, bukan sekadar keluwesan dalam mencari keuntungan hasil pemilihan," cetusnya.

Di sisi lain, PKN mendesak Presiden dan DPR RI segera menuntaskan pembenahan undang-undang pemilu dengan mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pembaruan

regulasi dinilai penting untuk memastikan sistem pemilu berjalan sesuai konstitusi dan memberikan ruang kompetisi yang adil bagi seluruh peserta.

Karena itu, Pasek menolak aturan pemilu yang berpotensi mempersempit persaingan politik, mengurangi makna suara sah masyarakat, atau mempertahankan dominasi partai yang telah lebih dahulu menikmati kekuasaan.

Selain itu, desain pemilu nasional dan daerah juga harus menjadi bagian dari pembahasan dengan mengutamakan kepentingan konstitusi serta kualitas demokrasi. Ia menegaskan, regulasi pemilu semestinya tidak disusun untuk menguntungkan kelompok tertentu maupun menghambat kemunculan kekuatan politik baru.

NASIONAL

Mercy Sihombing Cabut Gugatan Ijazah Gibran di PTUN, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.09 WIB



BANDA ACEH - Gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dicabut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pihak penggugat, Mercy Sihombing, melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, menyatakan pencabutan dilakukan karena tidak ada bukti baru yang dilampirkan Gibran selaku pihak tergugat.

Denny mengatakan, pihaknya sebelumnya telah meminta Gibran melampirkan sejumlah bukti terkait riwayat pendidikannya. Namun, bukti-bukti tersebut tidak kunjung diserahkan dalam persidangan.

"Tetapi tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu. Terutama yang kami ingat di MK itu yang sempat agar kami pahami ada tiga," ujar Denny dalam sidang lanjutan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT dengan agenda penyerahan bukti di PTUN Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Adapun tiga bukti yang dimaksud yakni Certificate of Attendance dari UTS Insearch, transkrip nilai Gibran, dan bukti enrolment atau pendaftaran. Denny menyebut dokumen-dokumen tersebut hanya berada dalam penguasaan Gibran sehingga pihaknya tidak memiliki akses untuk mendapatkannya secara langsung.

"Kami tidak punya akses untuk ke sana. Pada saat di MK itu diserahkan, kami juga meminta untuk melalui Majelis MK untuk mendapatkan bukti itu. Tapi karena Tergugat saat itu hadir atas kewenangan Majelis, Majelis MK memu-

tuskan bahwa bukti-buktinya hanya untuk Majelis," tutur Denny.

Menurut Denny, ketiga dokumen tersebut penting karena menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat milik Gibran. Dia menyayangkan bukti-bukti itu tidak dilampirkan dalam persidangan di PTUN.

Atas pertimbangan tersebut, pihak penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan melalui majelis hakim. Denny menilai proses persidangan tidak berjalan sesuai harapan mereka dalam memperoleh bukti yang diperlukan.

"Dengan pertimbangan persidangan ini tidak kunjung mendapatkan kerja sama dalam artian mencari keadilan secara bersama-sama oleh Tergugat, maka hari ini melalui Majelis, kami memasukkan surat pencabutan gugatan," katanya.

Denny juga mempertanyakan kelanjutan gugatan apabila bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak dihadirkan. Dia menyebut pencabutan dilakukan dengan mempertimbangkan marwah pengadilan.

"Buat apalagi kalau ternyata Tergugat tidak mau menunjukkan apa dasar-dasar bukti-bukti melalui surat keterangan, apalagi bukti-bukti itu toh sudah juga disampaikan ke pengadilan yang lain? Kita menjaga marwah pengadilan," ujar Denny.

Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi menyatakan menghormati proses persidangan sejak awal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Aksi Emak-Emak di DPR Ajak Pengendara Bunyikan Klakson, Simbol Dukungan Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.23 WIB

BANDA ACEH - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI) mengajak pengendara membunyikan klakson sebagai simbol dukungan agar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya. Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPR RI, sekaligus untuk menggalang tanda tangan petisi pemakzulan Gibran, Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, para peserta aksi membentangkan spanduk putih bertuliskan, 'Bunyikan Klakson Kalau Setuju Gibran Turun!!!'.

Selain itu, spanduk berukuran besar terpasang di pagar Gedung DPR RI dengan tulisan 'Berikan Tanda Tangan Dukungan Anda Makzulkan Gibran'.

Koordinator Lapangan KNPRI, Merry Samely, mengatakan ajakan membunyikan klakson tersebut merupakan eksperimen sosial untuk melihat respons pengguna jalan terhadap tuntutan mereka.

"Kami melakukan sosial eksperimen, yaitu dengan minta kepada (pengendara) yang lewat membunyikan klakson apabila mereka setuju Gibran turun," kata Merry saat ditemui di halaman gerbang DPR RI, Rabu (28/10/2026).

Merry mengatakan aksi tersebut juga dibarengi dengan pembukaan posko penggalangan tanda tangan petisi. Petisi itu ditujukan kepada para wakil rakyat di Senayan agar DPR RI menindaklanjuti aspirasi mereka.

Menurut Merry, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober, Gibran semestinya berinisiatif mengundurkan diri. Karena hal itu tidak terjadi, KNPRI mendesak DPR mengambil langkah untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.

"Kami merasa bahwa gedung DPR tidak boleh kosong. Begitu tanggal 6 kemarin sudah putusan

MK, harusnya Gibran itu tinggal mundur. Tapi karena dia tidak mau mundur, terpaksa kita melakukan aksi seperti ini supaya dia diturunkan oleh DPR," tegasnya.

Merry mengaku memahami DPR RI tengah menjalani masa reses sehingga belum merespons tuntutan mereka. Namun, KNPRI mengaku telah menjadwalkan audiensi dengan pimpinan dewan setelah masa reses berakhir pada 8 Oktober.

Dia mengatakan surat permohonan audiensi telah disampaikan sekitar dua pekan sebelumnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Rumah Jokowi di Solo Digeruduk Massa Pejuang Merah Putih, Desak Gibran Mundur

Oleh Redaksi · 28 Okt, 16.06 WIB

BANDA ACEH - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Mereka mendesak Jokowi agar meminta putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mundur dari Wakil Presiden (Wapres).

Rombongan tiba di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pukul 11.00 WIB. Gang tersebut

merupakan akses utama menuju kediaman Jokowi.

Setibanya di ujung gang, perwakilan massa membacakan dua surat yang ditujukan kepada Jokowi.

Juru bicara aksi, Bangun Satoto mengatakan, surat tersebut berisi sejumlah tuntutan dan kritik terhadap mantan presiden tersebut. "Kami akan menyampaikan dua lembar surat," kata Bangun Satoto.

Surat pertama ditulis tangan dan berisi permintaan agar Jokowi tidak melabeli pihak ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Denny Indrayana Walk Out dari Sidang Gugatan Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14:35 WIB



BANDA ACEH - Profesor Denny Indrayana, selaku penggugat dalam perkara gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyatakan memilih keluar dari ruang sidang atau walk out pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026.

Denny walk out karena menilai pihak tergugat belum menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Gibran.

Dia mengatakan, telah berulang kali meminta keterangan selaku tergugat untuk menghadirkan dokumen yang mendasari penerbitan surat keterangan tersebut.

Permintaan itu, menurut dia, tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga melalui surat ter-

tulis yang diajukan pada pekan sebelumnya.

“Yang menjadi dasar kami walk out meninggalkan ruang sidang adalah sudah berkali-kali kami meminta agar tergugat kementerian menghadirkan bukti-bukti lengkap dasar mereka menerbitkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Saudara Gibran, berkali-kali,” kata Denny.

Namun, menurut Denny, bukti yang dihadirkan kementerian dalam persidangan justru didominasi peraturan, keputusan, dan undang-undang. Padahal, pihak penggugat meminta dokumen yang secara langsung menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.

Ia menyebut, dalam persidangan hari itu, kementerian kembali memasukkan sembilan alat bukti

yang menurutnya mayoritas berupa peraturan.

Denny juga mengatakan majelis hakim telah berulang kali mengingatkan tergugat agar menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.

“Dan ini lagi-lagi membuktikan tergugat tidak menghormati apa persidangan ini. Majelis yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi. Kami yang meminta berkali-kali tidak ditanggapi,” ujarnya.

Denny turut mempertanyakan sikap kementerian yang, menurut keterangannya, telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait persoalan tersebut dalam proses di Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak menghidirkannya dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia mencontohkan sejumlah dokumen yang disebutkan telah disampaikan dalam proses di Mahkamah Konstitusi, antara lain Certificate of Attendance, transkrip nilai, dan dokumen enrolment.

“Kalau mereka tidak mau menyampaikan bukti-bukti itu di Peradilan Tata Usaha Negara, artinya kan mereka membedakan perlakuan ini. Artinya, ada yang ditutup-tutupi ini,” kata Denny.

Ia menilai, tidak dihidirkannya dokumen yang diminta membuat penggugat mempertanyakan dasar penerbitan surat keterangan tersebut. Meski demikian, pernyataan mengenai adanya sesuatu yang ditutup-tutupi itu merupakan penilaian Denny dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti di persidangan.

Ajukan Pencabutan Gugatan

NASIONAL

Sidang Ijazah Jokowi, Saksi Ade Darmawan Konfirmasi Bukti Digital 15 Tautan Akun X Dokter Tifa

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14:19 WIB



BANDA ACEH - Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuding ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Dokter Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (29/10/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi pelapor Ade Darmawan untuk memberikan keterangan mengenai barang bukti digital berupa rekaman video, tangkapan layar, dan 15 tautan unggahan akun X milik terdakwa.

Di hadapan majelis hakim, Ade mengonfirmasi telah menjalani dua kali pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yakni pada 24 Juli 2025 dan 27 Februari 2026. Dia juga menjelaskan posisinya sebagai saksi pelapor dalam perkara yang menjerat Tifausziah Tyassuma atau Dokter Tifa.

Dalam persidangan, jaksa menunjukkan barang bukti berupa sebuah flashdisk dan dokumen tangkapan layar yang segelnya telah dibuka. Ade menjelaskan, flashdisk tersebut berisi rekaman video dan kumpulan tautan dari akun X milik Dokter Tifa.

"Sebagai saksi, saya membawa barang bukti pada saat memberikan kesaksian, jadi saya menyerahkan beberapa dokumen termasuk akun X ini dan telah dimasukkan dalam flashdisk," ujar Ade di ruang sidang, Kamis (29/10/2026).

Jaksa kemudian membacakan rincian 15 tautan unggahan akun X tersebut. Unggahan yang diserah-

kan sebagai barang bukti itu berasal dari periode 3 April hingga 21 April 2025.

Ade mengonfirmasi keaslian tautan dan tangkapan layar yang ditunjukkan dalam persidangan. Dia menyebut bukti-bukti tersebut dikumpulkan bersama Lechumanan sebelum keduanya memutuskan menempuh jalur hukum.

Selain unggahan di media sosial, Ade juga memberikan keterangan mengenai tayangan sebuah acara televisi yang menghadirkan Dokter Tifa sebagai narasumber. Dia mengaku menyaksikan tayangan tersebut melalui televisi maupun gawai bersama stafnya.

Menurut Ade, dalam acara itu Dokter Tifa menyampaikan sejumlah pernyataan mengenai analisis foto masa muda, bentuk gigi, hidung, hingga materi penelitian yang dikaitkan dengan foto ijazah yang beredar di internet.

Saat ditanya jaksa mengenai alasan mengumpulkan bukti, Ade mengatakan dirinya tergerak setelah melihat narasi yang menyebut ijazah Joko Widodo palsu. Dia mengaku mengetahui klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyatakan ijazah tersebut asli.

"Jadi saya rasa kalau UGM sudah mengatakan bahwa ijasanya asli, ya kan tidak mungkin," tuturnya.

Keterangan Ade tersebut disampaikan dalam persidangan sebagai bagian dari pemeriksaan saksi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Guntur Romli Pertanyakan Agama dan Kewarasan Gibran, Sebut Jadi Beban Prabowo

Oleh Redaksi · 28 Okt, 20:44 WIB

BANDA ACEH - Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mempertanyakan sikap Gibran yang dinilai tidak merespons seruan moral dan etik terkait polemik pencalonannya sebagai wakil presiden.

Guntur bahkan melontarkan pertanyaan tajam mengenai rasa malu, agama, dan kewarasan Gibran. Menurut dia, seseorang yang masih memiliki kesadaran moral semestinya merespons kritik, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut konstitusi dan etika dalam kehidupan bernegara.

“Kami juga sebenarnya masih husnuzan. Husnuzan bahwa Gibran ini masih manusia yang beragama dan masih waras,” kata Guntur di Channel YouTube Sinkos Indonesia, Rabu (28/10/2026).

Ia kemudian mengaitkan kritik tersebut dengan ajaran agama mengenai pentingnya rasa malu sebagai bagian dari iman.

“Kalau beragama itu kan al-hayā'u minal iman. Malu itu bagian dari iman,” ujarnya.

Guntur menilai sikap diam terhadap kritik moral yang disampaikan berbagai kalangan menimbulkan pertanyaan mengenai kesediaan Gibran untuk melakukan evaluasi diri.

Menurut dia, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan etika pejabat publik. Jabatan wakil presiden, kata dia, semestinya disertai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi Politik dan kepatuhan terhadap konstitusi.

Guntur juga menyoroti seruan moral dari kalangan akademisi. Ia menyebut sekitar 150 guru besar telah menyuarakan kritik terhadap persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Dalam pandangannya, kritik dari kalangan akademisi semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi pejabat negara, bukan diabaikan tanpa penjelasan yang memadai.

“Ketika orang sudah kelihatan di pucuk, dia telanjang, diteriakin oleh 150 guru besar, kamu melanggar konstitusi, kamu enggak punya etika, kamu harus mundur,” ujar Guntur.

Selain menyoroti sikap Gibran, Guntur juga mempersoalkan keterangan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai proses penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19, khususnya Pasal 18 ayat (3).

Menurut Guntur, mantan Ketua KPU menyebut ketentuan tersebut merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan. Namun, ia mengklaim bahwa direktur jenderal dari kementerian terkait telah menyatakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Kapolda Aceh Pimpin Sidang Kelulusan PAG dan SBP, 38 Peserta Dinyatakan Lulus Terpilih

Oleh Redaksi · 28 Okt, 22:09 WIB

BANDA ACEH - Polda Aceh menggelar sidang penetapan kelulusan tingkat panitia daerah seleksi Pendidikan Alih Golongan (PAG) dari bintang ke perwira Polri Tahun Anggaran 2026 dan Sekolah Bintara Polisi (SBP) dari tamata ke bintang Tahun Anggaran 2027, Rabu, 28 Oktober 2026.

Sidang yang berlangsung di Aula Meuligoe Tribrata Polda Aceh tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Latif Usman dan Irwasda Kombes Pol. Iskandar Z.A. Kegiatan itu turut dihadiri

Dir Samapta Polda Aceh, Karo SDM Polda Aceh, para ketua tim panitia daerah, pengawas internal, serta seluruh peserta seleksi PAG dan SBP.

Dalam amanatnya, Irjen Pol. Ruddi menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung transformasi Polri. Oleh karena itu, setiap personel dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme agar mampu menjawab tantangan tugas kepolisian yang semakin berkembang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.06 WIB



BANDA ACEH -Keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030 melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 adalah usulan DPW PPP seluruh Indonesia.

Demikian penegasan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat Dasuki melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.

Menurut Saiful, keputusan pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin setelah mempertimbangkan hasil Keputusan Mukernas I PPP di Makassar pada Februari 2026 dan Keputusan Mahkamah Partai no.01/Tim-int/DPP-PPP/2026 tertanggal 1 Mei 2026.

DPW PPP melihat adanya upaya inkonstitusional yang terus Agus Suparmanto dan Taj Yasin. Terakhir keduanya mengeluarkan surat keputusan atas nama DPP PPP dengan ditandatangani oleh wakil ketua umum dan Sekjen dengan menunjuk Plt DPW Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten, dan Bengkulu.

"Padahal dalam AD/ART PPP, ketua umum adalah penanggung-jawab umum partai dan waketum membantu kerja ketum. Hal-hal seperti ini sudah kebablasan dan sangat vulgar untuk merusak sistem mekanisme organisasi di DPP PPP," kata Saiful.

Selain itu, Saiful memastikan bahwa pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin

dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030 bukan keinginan Ketua Umum Muhammad Mardiono pribadi.

"Pemberhentian mereka merupakan keputusan bersama yang diambil melalui forum resmi PPP," kata Saiful.

Saiful menambahkan bahwa sudah satu tahun Agus Suparmanto dan Taj Yasin tidak pernah hadir di DPP PPP.

"Mereka baru datang semalam untuk membicarakan jabatan mereka yang terlepas," kata Saiful.

Diketahui, keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026

yang dipimpin Mardiono secara daring pada Selasa 27 Oktober 2026.

Dalam keputusan yang dibacakan pada akhir rapat, PPP menyatakan memberhentikan sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut.

"Rakornas III ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025-2030," demikian bunyi keputusan tersebut.

NASIONAL

Parpol Mulai Balik Badan, Sosok Kuat Ini Disebut Jadi Satu-satunya Tumpuan Jokowi

Oleh Redaksi · 29 Okt, 21.44 WIB



BANDA ACEH - Di tengah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hubungan Politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik (parpol) menjadi sorotan. Pengamat Politik M. Tri Andika menilai, dalam situasi saat ini, peluang para ketua umum parpol untuk bertemu dengan Jokowi terbilang kecil.

"Dengan posisi Pak Jokowi yang lemah hari ini, sulit membayangkan bahwa partai-partai politik, ketum-ketum partai politik mau membuka pintu untuk bernegosiasi untuk bertemu bahkan sekedar bertemu dengan Pak Jokowi," ujarnya dalam kanal YouTube tvOneNews, dikutip Kamis (29/10).

"Karena siapapun yang bertemu Pak Jokowi pada hari ini ya itu bisa ditafsirkan secara liar oleh pihak-pihak yang berkepentingan git," imbuhnya.

Andika menilai, dalam situasi tersebut, Jokowi perlu menjaga

hubungan baik dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo menjadi satu-satunya instrumen politik yang dapat diandalkan Jokowi untuk memperbaiki atau menangani situasi yang tengah bergejolak.

Sebagai informasi, Gibran saat ini mendapat desakan untuk mundur dari jabatan wakil presiden setelah adanya putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam putusan tersebut, MK disebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat SMA sebagaimana dipersyaratkan dalam pencalonan.

Dokumen Certificate of Attendance yang diserahkan pihak Gibran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dibedakan dari ijazah kelulusan. Dokumen tersebut merupakan sertifikat kehadiran dalam kegiatan belajar, bukan bukti bahwa seseorang telah menamatkan pendidikan.

NASIONAL

Jokowi Siap Hadiri Sidang Roy Suryo dan Tifa, Janji Jawab Semua Pertanyaan

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.12 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapannya menghadiri sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan dokter Tifa.

Jokowi pun menegaskan akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan saat sidang.

"Saya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan, kalau diundang Insyaallah saya akan hadir," kata Jokowi di Solo, Kamis (29/10/2026).

Jokowi mengaku belum tahu secara pasti kapan dirinya dipanggil guna menghadiri sidang. Jika ada undangan, Jokowi kembali memastikan dirinya akan hadir.

Jokowi mengemukakan, dirinya akan menjawab pertanyaan semua

pihak yang terkait, baik hakim, jaksa penuntut umum maupun pengacara para terdakwa.

Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah mengatakan, surat pemanggilan untuk hadir di persidangan sudah diterima Selasa kemarin.

Selain Jokowi, Syarif juga dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang sama. "Nanti akan hadir di pengadilan 5 November 2026," kata Syarif.

Sedangkan untuk dokumen, termasuk ijazah Jokowi, semuanya telah disita oleh kepolisian. Sehingga nanti akan dibawa kejaksaan dan bisa ditampilkan saat sidang

ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

NASIONAL

Kebutuhan Dasar Rakyat Tak Terjamin, Masyarakat: Terus Pemerintah Fungsinya Apa?

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.40 WIB



BANDA ACEH - Udara bersih, air layak, pendidikan hingga kesehatan disorot. Jika kebutuhan dasar rakyat saja dipertanyakan, lalu apa fungsi pemerintah sebenarnya?

Annete Mau dari Aliansi Ibu Indonesia melontarkan kritik terhadap pemerintah dalam aksi mahasiswa pada 28 Oktober 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.

Ia mempertanyakan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari udara bersih, air layak, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan.

Dalam orasinya, Annete menilai pemerintah seharusnya mengelola uang pajak untuk kepentingan masyarakat.

Namun, menurut dia, berbagai persoalan mendasar masih membayangi kehidupan warga.

“Masalahnya adalah tidak ada kebutuhan dasar hidup yang dija-

min oleh pemerintah,” kata Annete dalam video wawancara yang menyebar luas di media sosial.

Ia mempertanyakan fungsi pemerintah apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh lingkungan yang sehat, pendidikan layak, layanan kesehatan terjangkau, dan kesempatan kerja.

Kritik tersebut menjadi bagian dari tuntutan agar kebijakan publik lebih berpihak pada kebutuhan warga.

Annete menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia yang berdampak terhadap kualitas udara.

Ia mempertanyakan jaminan pemerintah atas hak masyarakat untuk menghirup udara bersih.

Selain itu, ia menyinggung pencemaran sungai yang dikaitkannya dengan aktivitas pertambangan.

Menurut Annete, kerusakan lingkungan dapat mengancam kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.

Baginya, udara dan air bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha, menegakkan aturan lingkungan, serta memastikan masyarakat tidak menanggung dampak pencemaran.

Annete kemudian menyoroti kondisi pendidikan.

Ia mempertanyakan kesejahteraan guru dan kondisi bangunan sekolah yang dinilainya masih memprihatinkan.

Ia juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, penggunaan anggaran publik perlu dilihat berdasarkan kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Di sektor kesehatan, Annete menyinggung paparan asap akibat kebakaran serta mempertanyakan keterjangkauan layanan kesehatan.

Ia juga menyampaikan kekawatiran mengenai pertanggungjawaban BPJS Kesehatan yang menurutnya semakin terbatas.

Persoalan akses layanan kesehatan, kata dia, menjadi penting karena masyarakat membutuhkan perlindungan ketika sakit tanpa terbebani biaya yang sulit dijangkau.

Annete turut mempertanyakan rasa aman warga ketika menyampaikan pendapat di ruang publik.

Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah dan menyuarkan aspirasi.

NASIONAL

Masa Depan PPP Potensi Makin Suram Buntut Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin

Oleh Redaksi · 29 Okt, 09.00 WIB



BANDA ACEH -Keputusan Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030 berpotensi memperpanjang konflik internal dan menghambat upaya pemulihan PPP.

Demikian pandangan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu 28 Oktober 2026.

Menurut Iwan, perseteruan yang terus berulang menunjukkan bahwa elite PPP belum berhasil mengambil pelajaran dari percetakan sebelumnya.

Konflik antarkubu, kata dia, turut melemahkan kekuatan partai hingga PPP gagal mempertahankan kursi di DPR pada Pemilu 2024.

“Kebesaran PPP di masa lalu hilang disebabkan oleh pimpinan mereka sendiri yang tidak bisa mengelola keberagaman yang ada di dalam tubuh partai. Saling pecat, mau menang dan berkuasa sendiri menunjukkan bahwa pimpinan PPP belum dewasa dalam

berpolitik dan berorganisasi,” kata Iwan.

Iwan menilai PPP masih memiliki peluang untuk bangkit dan memulihkan kekuatan politiknya. Namun, upaya tersebut akan sulit dilakukan apabila konflik internal terus berlanjut dan menghambat konsolidasi organisasi.

Iwan juga menyoroti informasi mengenai dugaan meluasnya perseteruan hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, jika konflik dan pemberhentian kader benar-benar terjadi di sejumlah wilayah, dampaknya dapat semakin melemahkan struktur organisasi serta basis dukungan partai.

“Bahkan infonya sejumlah tokoh di daerah juga dipecat sebagai anggota DPRD dan kader partai. Jika betul ini terjadi, maka masa depan PPP akan semakin suram,” kata Iwan.

Polemik terbaru ini kembali menempatkan soliditas internal PPP dalam sorotan. Di tengah upaya membangun kembali kekuatan partai setelah gagal lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024, konflik kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri bagi PPP dalam mempersiapkan konsolidasi menuju Pemilu 2029, mendatang.

EDUKASI

Dilepas dengan Pesan Adab, Mahasiswa USK Berangkat Olah Kunyit Jadi Teh Herbal untuk Warga Blang Tingkuem

Oleh Syarifudin Brutu · 28 Okt, 19.58 WIB

BANDA ACEH – Sebanyak 16 mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) dari berbagai program studi dilepas untuk menjalankan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Blang Tingkuem, Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Pelepasan digelar di Ruang MIPA A 01.03, Fakultas MIPA USK, Banda Aceh, Rabu (28/10/2026), pukul 16.00 hingga sekitar 18.00 WIB.

Program tersebut merupakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program Aksara Mahasiswa, DPPM BIMA Tahun 2026, yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Mengusung judul “Penerapan Teknologi Pengolahan Teh Herbal Berbasis Tumbuhan Obat Lokal untuk Penguatan Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Blang Tingkuem”, program ini berfokus pada produksi dan pengolahan kunyit menjadi teh herbal bernilai ekonomi.

Kelompok mahasiswa diketuai oleh Syarifudin Brutu dan dibagi menjadi tiga tim, yakni tim produksi, tim edukasi, dan tim kompos.

Tim kompos bertugas mengolah limbah organik sisa produksi. Anggotanya tidak hanya berasal dari rumpun sains seperti biologi, kimia, farmasi, dan pertanian, tetapi juga dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Ilmu Komunikasi, dan beberapa latar keilmuan lainnya.

Penanggung jawab program adalah Prof. Dr. Zumaidar, S.Si., M.Si., guru besar Jurusan Biologi FMIPA USK, yang dibantu sejumlah dosen lain.

Acara dibuka Dr. Dra. Sulastri, M.Si., yang juga anggota tim pengusul program. Ia menjelaskan, kegiatan dirancang secara menyeluruh, mulai dari budi daya hingga pemasaran.

“Kami berfokus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanam menggunakan pupuk organik, serta ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Aceh Barat Perkuat Tata Kelola Data Lewat Portal SATURASI

Oleh Aceh Barat · 28 Okt, 17.04 WIB

MEULABOH — Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) menggelar coaching clinic penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti pengelola data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan dibuka Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, di Aula Diskominsa, Selasa (27/10/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominsa Dedy Jefernal, Kepala Bidang Per-

sandian dan Statistik Fachmi Suchairi, serta Tim Koordinasi dan Asistensi Bupati (TKAB), Afrizal Abdul Rasyid.

Dedi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola data, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan dan pemanfaatannya.

Menurut dia, penguatan Satu Data Indonesia membutuhkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengambilan

kebijakan, serta penyusunan anggaran daerah.

“Muara dari seluruh proses penyelenggaraan Satu Data adalah tersedianya data yang dapat dipercaya dan digunakan bersama,” ujar Dedi.

Ia menegaskan, Satu Data Indonesia bukan sekadar membangun portal digital, melainkan membentuk ekosistem tata kelola data yang terintegrasi. Dengan demikian, instansi pemerintah maupun masyarakat dapat mengakses data yang dibutuhkan tanpa harus berulang kali mengajukan permintaan kepada perangkat daerah.

Dedi menjelaskan, kemudahan tersebut hanya dapat terwujud apabila data dalam portal selalu diperbarui, lengkap, dan sesuai standar. Selain mempercepat pertukaran informasi, sistem tersebut diharapkan mengurangi beban administrasi serta menghemat waktu dan biaya.

Dalam kegiatan itu, Diskominsa juga memberikan pendampingan tata kelola portal Satu Data Kabupaten Aceh Barat melalui transformasi Portal Open Data Aceh Barat dari domain data.acehbaratkab.go.id menjadi portal baru SATURASI (Satu Data untuk Gerak ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Nusron Wahid Dua Kali Tak Penuhi Panggilan KPK, Mahfud Desak Prabowo Bertindak

Oleh Redaksi · 29 Okt, 09.12 WIB



Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. FOTO/Net.

JAKARTA - Dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kini menjadi sorotan.

Bukan hanya soal ketidakhadirannya dalam pemeriksaan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengu-rasan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetapi juga sikap Presiden Prabowo Subianto yang belum menyampaikan pernyataan terbuka terkait persoalan tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mempertanyakan sikap Presiden Prabowo di tengah mencuatnya pemberitaan

mengenai ketidakhadiran menteri tersebut dalam panggilan KPK.

Mahfud menilai, sulit bagi Presiden Prabowo untuk tidak mengetahui persoalan itu mengingat pemberitaannya telah meluas di media massa. Karena itu, ia menyayangkan belum adanya sikap terbuka dari kepala negara.

“Saya juga agak mempertanyakan, atau kalau boleh menyesalkan, kenapa Pak Prabowo diam itu ada menteri dipanggil KPK tidak datang. Tidak mungkin presiden tidak dengar berita itu,” kata Mahfud dalam podcast pribadinya dikutip Kamis (29/10/2026).

Menurut Mahfud, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut ketidakhadiran seorang menteri dalam pemeriksaan, tetapi juga berkaitan dengan sikap pemerintah dalam menghormati proses hukum.

Ia menilai, presiden perlu menunjukkan ketegasan agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap pejabat kabinet yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

Mahfud bahkan menyarankan agar Prabowo menegur Nusron secara terbuka. Langkah itu, menurut dia, penting untuk menjaga kredibilitas pemerintahan sekaligus menegaskan bahwa jabatan di kabinet tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan panggilan aparat penegak hukum.

“Pak Prabowo perlunya apa? Publicly dia bicara, ‘Eh, menteri kamu dipanggil tuh datang kamu ngotor-ngotorin nama saya di kabinet saya, kamu dipanggil malah secara sengaja mangkir gitu,’” ujar Mahfud.

Mahfud juga menegaskan, apabila Nusron merasa tidak bersalah, ia seharusnya memenuhi panggilan

KPK dan memberikan penjelasan mengenai persoalan yang sedang disidik.

Sorotan Mahfud tersebut menempatkan persoalan ini pada dua hal: kepatuhan pejabat negara terhadap proses hukum dan sikap Presiden dalam merespons persoalan yang melibatkan anggota kabinetnya.

Hingga persoalan ini menjadi sorotan, pertanyaan mengenai sikap terbuka Presiden Prabowo terhadap ketidakhadiran Nusron dalam panggilan KPK menjadi bagian dari perhatian publik.

Di sisi lain, status Nusron dalam perkara tersebut tetap sebagai saksi, dan dugaan suap serta gratifikasi yang diselidiki KPK tidak dapat ...

NASIONAL

Komisi III DPR: Awas! RUU Perampasan Aset Jadi Alat Penyalahgunaan Kekuasaan

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.16 WIB



BANDA ACEH -Komisi III DPR mengingatkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dilakukan secara hati-hati agar tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Adang Daradjatun berharap RUU Perampasan Aset mampu memperkuat pemberantasan kejahatan dan pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat.

“Perampasan aset harus menjadi instrumen untuk memberantas kejahatan dan memulihkan kerugian negara, bukan menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, setiap kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan mekanisme pengawasan yang memadai,” kata Adang kepada wartawan, Kamis, 29 Oktober 2026.

Legislator PKS itu juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Aset yang berkaitan dengan tindak pidana harus dibedakan secara tegas dari harta milik pihak lain yang diperoleh secara

sah dan tidak terlibat dalam kejahatan.

Adang menilai, mekanisme keberatan dan pengujian melalui proses hukum yang adil perlu diatur agar masyarakat yang terdampak memiliki kesempatan mempertahankan hak kepemilikannya.

Selain itu, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Jangan sampai ketentuan yang dibentuk justru menimbulkan ketidakpastian hukum atau membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata mantan Wakapolri ini.

Lebih jauh, Adang berharap masukan para pakar dan praktisi hukum menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan pasal demi pasal RUU Perampasan Aset.

“Rumusan yang komprehensif diperlukan agar regulasi ini dapat memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, menjamin proses hukum yang adil (due process of law), serta menjaga prinsip negara hukum,” pungkas Adang.

LIFESTYLE

Pernikahan Jokowi hingga Kelahiran Gibran Janggal, Peneliti Dokumen Jabarkan Jarak Waktu yang Aneh

Oleh Redaksi · 28 Okt, 21.04 WIB

BANDA ACEH - Peneliti dokumen Luke Susilo menyatakan keyakinannya bahwa ijazah Joko Widodo (Jokowi) palsu dengan tingkat keyakinan 99,98 persen.

Ia mendasarkan penilaian itu pada dua hal, yaitu karena tak pernah ditunjukkan ke publik dan kronologi janggal dalam video kampanye “Cerita Hidup Jokowi”.

Pernyataan ini disampaikan Luke Susilo dalam obrolan bersama Refly Harun yang tayang di channel YouTube REFLY HARUN PODCAST pada 27 Oktober 2026.

“Apakah Anda yakin ijazah Jokowi itu palsu atau asli? Kalau yakin asli berapa persen keyakinannya? Kalau yakin palsu berapa persen keyakinannya?” tanya Refly.

Luke menjawab, “Kalau soal ijazahnya sejauh ini saya yakin 100% palsu. Ya udah 99, 98 aja,” ujarnya.

“UGM mengatakan asli, Labfor mengatakan asli, teman-teman

mengatakan asli, tapi barang yang asli itu yang mana? Kan enggak pernah ditunjukkan,” tambahnya.

Refly menyebut pernah melihat dokumen itu bersama sejumlah orang.

“Kita geruduk ramai-ramai satu dokumen, kita lihat ada beberapa kepala di situ kan,” kata Refly.

Alasan kedua berkaitan dengan video “Cerita Hidup Jokowi” yang diunggah 12 April 2019, lima hari sebelum pemilihan presiden.

Luke menilai video itu dipersiapkan serius.

“Ini kan betul-betul video yang sangat dipersiapkan dengan luar biasa,” katanya.

Narasi dalam video itu, yang diputar dan dibacakan dalam diskusi, berbunyi: “Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh.”

Narasi berlanjut: “Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama dua setengah tahun.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

BPJS Kesehatan Jelaskan Cara Mengaktifkan Kembali PBI JK

Oleh Aceh Barat · 28 Okt, 16.51 WIB

JAKARTA – BPJS Kesehatan mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk rutin mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Imbauan ini menyusul penonaktifan sejumlah peserta akibat pemutakhiran data penerima bantuan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa penyesuaian kepesertaan dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria kesejahteraan desil 1–5 tidak termasuk dalam sasaran penerima PBI JK.

“Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya. Jika statusnya tidak aktif, peserta dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar Rizzky, Rabu (28/10/26).

Peserta yang tercatat dalam desil 6–10, tetapi kondisi ekonominya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat mengajukan pembaruan data melalui kantor desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat. Peserta diberikan waktu 90 hari untuk memperbarui data sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Pengecekan data bantuan sosial juga dapat dilakukan melalui situs

resmi Kementerian Sosial di <https://cekbangsos.kemensos.go.id/>.

Sementara itu, peserta yang kondisi ekonominya sudah sesuai dengan data atau telah mampu membayar iuran secara mandiri diimbau beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri agar perlindungan kesehatannya tetap terjaga.

Peserta Nonaktif Bisa Ajukan Reaktivasi

BPJS Kesehatan menyebut peserta PBI JK yang dinonaktifkan masih berpeluang mengajukan reaktivasi sesuai ketentuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, mekanisme ini mencakup peserta yang dinonaktifkan dalam jangka waktu

paling lama enam bulan serta peserta nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Untuk mengajukan reaktivasi, peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Dinas Sosial selanjutnya mengusulkan reaktivasi kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi.

Jika dinyatakan memenuhi persyaratan, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaan sehingga peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Nusron Dua Kali Absen dari Panggilan KPK, Mahfud: Prabowo Kok Diam!

Oleh Redaksi · 29 Okt, 09.09 WIB



BANDA ACEH - Dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kini menjadi sorotan.

Bukan hanya soal ketidakhadirannya dalam pemeriksaan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengu-rusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetapi juga sikap Presiden Pra-bowo Subianto yang belum menyampaikan pernyataan ter-buka terkait persoalan tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kea-manan Mahfud MD memperta-nyakan sikap Presiden Prabowo di tengah mencuatnya pemberitaan

mengenai ketidakhadiran menteri tersebut dalam panggilan KPK.

Mahfud menilai, sulit bagi Pre-siden Prabowo untuk tidak menge-tahui persoalan itu mengingat pemberitaannya telah meluas di media massa. Karena itu, ia menyayangkan belum adanya sikap terbuka dari kepala negara.

“Saya juga agak mempertanya-kan, atau kalau boleh menyesal-kan, kenapa Pak Prabowo diam itu ada menteri dipanggil KPK tidak datang. Tidak mungkin presiden tidak dengar berita itu,” kata Mahfud dalam podcast pribadinya dikutip Kamis (29/10/2026).

Menurut Mahfud, persoalan ter-sebut tidak semata-mata menyang-kut ketidakhadiran seorang men-teri dalam pemeriksaan, tetapi juga berkaitan dengan sikap pemerintah dalam menghormati proses hukum.

Ia menilai, presiden perlu menunjukkan ketegasan agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap pejabat kabinet yang sedang ber-hadapan dengan proses hukum.

Mahfud bahkan menyarankan agar Prabowo menegur Nusron secara terbuka. Langkah itu, menurut dia, penting untuk men-jaga kredibilitas pemerintahan sekaligus menegaskan bahwa jaba-tan di kabinet tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan panggi-lan aparat penegak hukum.

“Pak Prabowo perlunya apa? Publicly dia bicara, ‘Eh, menteri kamu dipanggil tuh datang kamu ngotor-ngotorin nama saya di kabinet saya, kamu dipanggil malah secara sengaja mangkir gitu,’” ujar Mahfud.

Mahfud juga menegaskan, apa-bila Nusron merasa tidak bersalah, ia seharusnya memenuhi panggilan

KPK dan memberikan penjelasan mengenai persoalan yang sedang disidik.

Sorotan Mahfud tersebut menempatkan persoalan ini pada dua hal: kepatuhan pejabat negara terhadap proses hukum dan sikap Presiden dalam merespons persoa-lan yang melibatkan anggota kabi-netnya.

Hingga persoalan ini menjadi sorotan, pertanyaan mengenai sikap terbuka Presiden Prabowo terhadap ketidakhadiran Nusron dalam panggilan KPK menjadi bagian dari perhatian publik.

Di sisi lain, status Nusron dalam perkara tersebut tetap sebagai saksi, dan dugaan suap serta grati-fikasi yang diselidiki KPK tidak ...

NASIONAL

Viral Wartawan Dihalangi Liput Demo di Bundaran HI, Polda Metro Minta Maaf

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.20 WIB



JAKARTA - Polda Metro Jaya meminta maaf setelah aksi polisi yang menghalangi wartawan men-dekat ke lokasi demo di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta pada Rabu (28/10/2026) untuk meliput viral di media sosial.

Peristiwa tersebut terjadi saat aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Dalam video yang beredar, per-sonel polisi terlihat melarang jurnalis meliput aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasi maha-siswa dan masyarakat.

Tindakan tersebut menuai sorotan karena menghambat kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyam-paikan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

Dia memastikan peristiwa itu akan menjadi bahan evaluasi bagi institusinya.

"PMJ (Polda Metro Jaya) mohon maaf atas kejadian terse-but," kata Budi Hermanto, Kamis (29/10/2026).

Budi mengatakan tindakan per-sonel saat bertugas di lapangan akan dievaluasi.

Dia menegaskan keselamatan masyarakat dan jurnalis menjadi prioritas kepolisian.

"Dan akan menjadi evaluasi bagi kami, keselamatan masyara-kat dan jurnalis merupakan priori-tas utama," ujarnya.

Sebelumnya dalam video yang beredar, terlihat seorang polisi yang mengamankan demo di Bun-daran HI terlihat menghalangi jurnalis mendekat ke titik aksi.

Jurnalis IDN Times menjelas-kan kedatangannya untuk meliput demo.

Dia bahkan telah menunjukkan kartu tanda pengenalan pers kepada polisi tersebut.

"Ini saya ada ID card-nya lo, Mas. Ini saya ada ID card-nya ya, Mas, ini resmi," ujar sang jurnalis.

Namun, polisi itu bersikeras meminta jurnalis untuk tidak men-dekat ke lokasi demo.

"Putar balik Ibu, enggak bisa Ibu, mohon maaf, demi kenyama-nan Ibu," kata polisi itu.

EDUKASI

Bunda PAUD Aceh Perkuat Sinergi Pendidikan Anak Usia Dini di Gayo Lues

Oleh Redaksi · 28 Okt, 15.06 WIB

GAYO LUES – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh, Mukarramah Fadhullah membuka kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Gayo Lues yang berlangsung di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Gayo Lues, Rita Elviani, serta para Bunda PAUD kecamatan dan gampong sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung penye-lenggaraan pendidikan anak usia dini.

Dalam kesempatan tersebut, Mukarramah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkon-tribusi dalam menyukseskan kegi-atan tersebut.

Apresiasi secara khusus disam-paikan kepada para Bunda PAUD kecamatan dan gampong yang telah mengambil peran dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi pen-

ting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berkarakter.

Karena itu, diperlukan perhatian dan keterlibatan bersama agar setiap anak memperoleh kesempa-tan untuk tumbuh dan berkem-bang secara optimal sejak usia dini.

Penguatan Pokja Bunda PAUD juga menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran strategis Bunda PAUD dalam mendorong kepedu-lian masyarakat terhadap pendidi-kan anak usia dini.

Peran tersebut tidak hanya ber-kaitan dengan pendidikan, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan keluarga, masyarakat, serta berba-gai pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Mukarramah menekankan pen-tingnya kolaborasi berkelanjutan antara Bunda PAUD di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga gampong.

Koordinasi yang baik di setiap tingkatan diharapkan dapat mem-perkuat pelaksanaan program PAUD serta mendorong tercipta-nya lingkungan yang aman ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Dari Anggaran Rp18 Miliar, BNNP Aceh Hanya Punya Rp1 Miliar untuk Berantas Narkoba

Oleh Redaksi · 28 Okt, 19.28 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH – Anggaran terbatas membuat ruang gerak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dalam memberantas peredaran narkotika masih terkendala. Dari total anggaran Rp18 miliar yang tersedia pada 2026, hanya sekitar Rp1 miliar yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pembre-rantasan narkoba di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani dalam kegiatan silatu-rahmi bersama wartawan di Rabu (28/10/2026).

Ia mengatakan, sekitar Rp16 miliar dari anggaran tersebut digu-nakan untuk membayar gaji pega-wai. Sementara itu, anggaran yang

tersisa harus dibagi untuk kebutu-han operasional dan kegiatan pem-beantasan narkotika.

“Pada 2026, BNNP Aceh mem-peroleh anggaran Rp18 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp16 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai. Dengan demikian, anggaran yang tersedia untuk kebutuhan lainnya sangat terbat-as,” kata Dedy dalam kegiatan silaturahmi bersama wartawan di Rabu, 28 Oktober 2026.

Dedy menjelaskan, dari sisa anggaran sekitar Rp2 miliar, sepa-ruhnya digunakan untuk membia-yai kebutuhan operasional kantor, seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas. Adapun Rp1 miliar lainnya dialo-kasikan untuk kegiatan, mulai dari

sosialisasi hingga penindakan nar-kotika.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi salah satu tantangan bagi BNNP Aceh dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika. Meski demikian, lembaga itu tetap melakukan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba.

Sepanjang 2026, BNNP Aceh telah melakukan lima kali penin-dakan. Namun, hanya dua kegi-atan yang dibiayai oleh negara, sedangkan tiga lainnya mengguna-kan biaya sendiri.

“Sepanjang 2026, kami telah melakukan lima kali penindakan. Dua kegiatan dibiayai oleh negara, sementara tiga lainnya kami tang-gung dengan biaya sendiri,” ujar Dedy.

Ia mengatakan, pemberantasan narkotika membutuhkan duku-ngan masyarakat. Menurut dia, upaya tersebut tidak dapat sepe-nuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum karena penceg-aan peredaran dan penyalahguna-an narkoba juga memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

“Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberantas pere-daran dan penyalahgunaan nar-koba di Aceh. Upaya ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, H. T. Dedy.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

KPK Terbitkan 2 Sprindik Baru, Kantor PT Djarum Digeledah

Oleh Redaksi · 29 Okt, 09.06 WIB



Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO/Dok. MI.

BANDA ACEH - Pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali berkembang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026, menetapkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda, sebagai tersangka dalam salah satu penyidikan, serta menggeledah kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Jawa Tengah.

Langkah tersebut menandai berlanjutnya pengembangan perkara yang sebelumnya diusut KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Februari 2026.

Namun, hingga penggeledahan dilakukan pada Rabu (28/10/2026), KPK belum membeberkan hasil penggeledahan maupun menjelaskan secara terpe-

rinci keterkaitan kedua lokasi dengan materi penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penerbitan dua sprindik baru merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara terkait Bea dan Cukai.

“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” kata Budi kepada wartawan dikutip Kamis (29/10/2026).

Dari dua sprindik tersebut, satu berkaitan dengan penetapan Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka. Sementara itu, dalam sprindik lainnya, belum ada penetapan tersangka yang diumumkan kepada publik.

Kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum Digeledah

Pengembangan penyidikan itu diikuti langkah penggeledahan di

dua lokasi di Jawa Tengah, yakni Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum. Saat memberikan keterangan, Budi memastikan proses penggeledahan masih berlangsung.

“Dalam pengembangan penyidikan ini, Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus. Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum. Saat ini penggeledahan masih berlangsung,” ujarnya.

Meski dua lokasi tersebut menjadi sasaran penggeledahan, KPK belum menjelaskan barang atau dokumen apa yang dicari maupun ditemukan penyidik.

Hubungan spesifik masing-masing lokasi dengan dugaan tindak pidana yang sedang diusut juga belum dipaparkan secara resmi.

Karena itu, penggeledahan di kantor PT Djarum tidak serta-merta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam tindak pidana. Keterkaitan lokasi tersebut dengan perkara masih menunggu penjelasan resmi KPK.

Sebelumnya, KPK mengusut dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai setelah menggelar OTT pada Februari 2026. Dalam perkara dugaan suap importasi barang dan gratifikasi itu, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 hingga Januari 2026, Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen ...

NASIONAL

PPP Kembali Panas, Agus Suparmanto dan Taj Yasin Dipecat

Oleh Redaksi · 29 Okt, 08.55 WIB



BANDA ACEH -Konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali memanans. Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono memberhentikan Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum (Waketum) dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2025-2030.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP Tahun 2026 yang dipimpin Mardiono secara daring pada Selasa 27 Oktober 2026.

Dalam keputusan yang dibacakan pada akhir rapat, PPP menyatakan memberhentikan sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan terhadap kedua kader tersebut.

“Rakornas III ini juga memutuskan untuk memberhentikan dan melakukan restrukturisasi kepengurusan saudara Agus Suparmanto dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum dan H Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025-2030,” demikian bunyi keputusan tersebut.

Ketua Mahkamah Partai DPP PPP versi Mardiono, Erfandi membenarkan keputusan pemberhentian Agus dan Taj Yasin. Ia mengklaim keputusan Rakornas III tersebut merupakan tindak lanjut dari Mukernas yang digelar kubu Mardiono di Makassar beberapa waktu lalu.

“Betul, Mukernas Makassar memutuskan untuk mengevaluasi kepengurusan yang tidak aktif,” kata Erfandi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2026.

Erfandi mengklaim persoalan itu bermula setelah sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) menggugat ke Mahkamah Partai terkait keaktifan kedua pengurus tersebut.

Mahkamah Partai kemudian memutuskan Agus dan Taj Yasin melanggar AD/ART partai serta meminta keduanya aktif hadir di kantor DPP dan mengikuti kegiatan partai. Namun, menurut Erfandi, keduanya tetap tidak aktif atau belum menjalankan permintaan tersebut.

SPORT

Mengapa Liga Inggris Selalu Menarik Perhatian? Ini Faktor di Balik Popularitas Premier League

Oleh Redaksi · 28 Okt, 20.39 WIB



BANDA ACEH - Setiap akhir pekan, jutaan pasang mata di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tertuju pada pertandingan Premier League.

Liga Inggris telah lama dianggap sebagai salah satu kompetisi sepak bola paling populer dan paling banyak ditonton. Apa saja faktor yang membuatnya begitu menarik? Berikut ulasannya.

Salah satu daya tarik terbesar Premier League adalah tingkat persaingannya. Tim papan atas, hingga bawah sering saling mengalahkan sehingga hasil pertandingan sulit diprediksi. Kejutan seperti tim promosi yang menum-

bangkan klub besar atau perebutan gelar yang baru selesai di pekan terakhir membuat setiap laga terasa penting.

Liga Inggris dikenal dengan tempo cepat, duel fisik, serta semangat bertarung hingga menit akhir. Meski kini banyak klub mengadopsi pendekatan taktik modern yang lebih teknikal, nuansa intens tetap menjadi ciri khas yang disukai penonton. Pertandingan yang jarang membosankan membuat liga ini selalu menghadirkan hiburan.

Premier League menjadi magnet bagi pemain dan pelatih terbaik dari berbagai negara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Kunjungi Ajendam IM, Pangdam Iskandar Muda Ingatkan Prajurit Hindari Judi Online dan Narkoba

Oleh Redaksi · 28 Okt, 15.33 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH — Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, melaksanakan kunjungan kerja ke Ajendam IM, Rabu (28/10/2026) pagi. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau kondisi satuan, mempererat komunikasi dengan personel, serta memberikan arahan guna meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam mendukung tugas Kodam Iskandar Muda.

Kedatangan Pangdam IM beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala Ajendam IM Kolonel Caj Sigit Aspriyanto, S.E., M.I.P., bersama para perwira

di depan Markas Komando Ajendam IM. Dalam arahannya, Pangdam IM menekankan pentingnya menjaga kehormatan sebagai prajurit TNI AD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran, seperti judi online, penyalahgunaan narkoba, dan gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan kemampuan.

Pangdam IM mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga nama baik diri, keluarga, dan satuan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai moral serta menaati peraturan yang berlaku. Ia juga mengajak seluruh personel untuk mendekatkan diri kepada

Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan keluarga sebagai motivasi dalam menjalankan tugas serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi.

Selain itu, Pangdam IM menegaskan pentingnya mengutamakan faktor keamanan dalam setiap pelaksanaan tugas, baik di lingkungan kerja, saat latihan, maupun ketika bertugas di lapangan. Seluruh personel diminta bekerja secara profesional, cermat, dan sesuai prosedur dengan tetap memperhatikan keselamatan personel maupun materiil.

Pangdam IM berharap Ajendam IM terus meningkatkan kualitas

pengabdian sesuai fungsi dan tanggung jawab kecabangan Ajudan Jenderal dalam mendukung tugas pokok Kodam Iskandar Muda. Pada kesempatan tersebut, Pangdam IM juga menyapa personel Ajenrem Lhokseumawe dan satuan lainnya secara daring sebagai bentuk perhatian pimpinan sekaligus upaya memperkuat komunikasi dan solidaritas antarsatuan.

Kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama keluarga besar Ajendam IM dan diakhiri dengan foto bersama.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



NASIONAL

Roy Suryo Tak Persiapan Hadapi Jokowi di Sidang Ijazah, Refly Harun Bikin Strategi

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.46 WIB



BANDA ACEH — Roy Suryo mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang sidang pembuktian kasus dugaan ijazah palsu yang dikabarkan akan menghadirkan mantan Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengaku tidak menyiapkan hal khusus untuk menghadapi Jokowi dalam persidangan mendatang.

"Enggak ada, persiapan apa? Enggak ada lah biasa. Emang Jokowi siapa?," kata Roy Suryo, Kamis (29/10/2026).

Sebagai informasi, dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Roy

Suryo, Joko Widodo belum pernah dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Atas dasar itu, Roy mendesak majelis hakim PN Jakarta Timur untuk memanggil Jokowi agar menunjukkan ijazah asli yang menjadi pokok persoalan dalam perkara tersebut.

Roy Suryo juga mengapresiasi Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Timur, Cristina Endarwati, yang telah meminta jaksa penuntut umum (JPU) segera menghadirkan Jokowi dalam persidangan.

"Kami sudah terus mengingatkan agar dihadirkan ijazah yang disebut-sebut itu asli ijazah. Kedua, dihadirkan orang yang didaftar sebagai saksi yaitu Joko Widodo," ungkap Roy.

Persiapan Pertanyaan Secara Matang

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan timnya tetap menyusun sejumlah pertanyaan secara matang untuk menghadapi Jokowi dalam persidangan, meskipun Roy mengaku tidak memiliki persiapan khusus.

Refly juga menyiapkan strategi agar waktu sidang pembuktian tidak habis karena perdebatan.

"Kita mewaspadai sebuah strategi persidangan yang tidak menguntungkan. Misalnya, misalnya, hakimnya kemudian karena ada perasaan tidak enak ini mantan kepala negara, lalu membatasi waktu misalnya. Kemudian

jaksa atau penuntut umum mengganggu," terangnya.

Menurut Refly, konsentrasi selama persidangan sangat penting apabila Jokowi hadir.

Dengan begitu, pihaknya dapat mengajukan pertanyaan yang langsung menyentuh pokok perkara.

Ia juga mengimbau para pendukung dugaan ijazah palsu yang berencana hadir di PN Jakarta Timur untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

"Karena itu ini tantangan bagi kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, terutama pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kita tanyakan dan itu preset, ya, memang well-prepared," imbuhnya

ACEH

Dirlantas Polda Aceh Ajak Pengguna Jalan Utamakan Keselamatan

Oleh Redaksi · 28 Okt, 14.57 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH — Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menjadi narasumber dalam dialog interaktif Banda Aceh Menyapa yang di selenggarakan oleh RRI Rabu, 28 Oktober 2026.

Kegiatan yang mengangkat topik "Operasi Patuh Seulawah 2026 Sasar Pelanggaran Lalu Lintas" ini berlangsung di Zoom Studio Program 1 RRI Banda Aceh.

Dalam dialog itu, Deden menjelaskan bahwa Operasi Patuh Seulawah 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini berfokus pada berbagai pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, sekaligus mendorong masyarakat membangun kebiasaan berkendara yang tertib dan aman.

Menurut Deden, operasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjadi upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, mengurangi fatalitas korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berkendara.

"Tujuan utama operasi ini bukan semata-mata melakukan penindakan, tetapi membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas. Keselamatan harus menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya karena ada petugas di jalan," ujarnya.

Operasi Patuh Seulawah 2026 diawali dengan apel gelar pasukan di Lapangan Utama Mapolda Aceh. Sebanyak 716 personel dilibatkan, terdiri atas 130 personel Polda Aceh serta 586 personel dari polres dan polresta jajaran.

Dalam pelaksanaannya, petugas memprioritaskan penindakan terhadap pelanggaran yang berisiko tinggi memicu kecelakaan. Di antaranya tidak menggunakan helm standar dan sabuk pengaman, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, melawan arus, melakukan balap liar, serta mengendarai kendaraan bermotor di bawah umur.

Penggunaan knalpot yang tidak sesuai ketentuan serta pelanggaran terkait dimensi dan muatan kendaraan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi perhatian dalam operasi tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ADVERTORIAL

Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda

Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdianya selama ini

Tertanda,
FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

NASIONAL

Viral! Jurnalis di Bogor Mengaku Dipiting dan Ditampar Saat Liput Demo, Ini Kronologinya

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.35 WIB



BANDA ACEH - Jurnalis video di Bogor mengaku dipiting dan ditampar saat meliput demo di Tugu Kujang. Ia juga diminta menghapus video penangkapan.

Pengalaman menegangkan dialami seorang jurnalis video media Metropolitan bernama Raka ketika meliput demonstrasi di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026).

Di tengah situasi yang memanas di sekitar Tugu Kujang, Raka mengaku dibawa sejumlah orang, mengalami tindakan fisik, hingga diminta menghapus rekaman peliputan.

Kejadian tersebut berlangsung ketika Raka sedang mengambil gambar kericuhan di Jalan Cida-nyang.

Di lokasi itu, terjadi ketegangan antara barisan kepolisian dan

massa aksi yang mengenakan pakaian serba hitam.

Raka sempat terpisah dari wartawan media tersebut saat keduanya mengambil gambar di kawasan yang sama.

Tidak lama kemudian, Raka terlihat dibawa oleh dua orang.

Ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya bukan demonstran, melainkan jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan.

Namun, menurut pengakuannya, upaya tersebut tidak langsung membuatnya bebas.

Raka menceritakan bahwa dirinya berulang kali menyebut statusnya sebagai wartawan.

Ia juga menunjukkan kartu identitas pers untuk menjelaskan alasan keberadaannya di lokasi demonstrasi.

"Saya pers," menjadi penegasan yang disampaikan ketika beru-

saha meyakinkan orang-orang yang membawanya.

Raka menduga identitasnya sempat diragukan.

Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya dianggap sebagai pers mahasiswa.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Raka mengaku mengalami tindakan fisik selama kejadian tersebut.

Ia menyebut seseorang memitingnya dari samping, kemudian membawanya secara paksa ke tempat lain.

Ia juga mengaku sempat ditampar.

Setelah dibawa meninggalkan lokasi awal, Raka mengaku berpindah ke beberapa tempat, termasuk sebuah minimarket.

Di sana, ia kembali berusaha memperjelas kedudukannya sebagai jurnalis media Metropolitan.

Kartu identitas pers miliknya disebut sempat diambil sebelum akhirnya dikembalikan.

Perjalanan Raka kemudian berlanjut ke kawasan jembatan penyeberangan orang atau JPO.

Di tempat tersebut, ia diminta duduk bersama dua orang peserta aksi lain yang juga diamankan.

Situasi itu membuat Raka kembali harus menjelaskan bahwa dirinya tidak sedang mengikuti demonstrasi sebagai peserta.

Ia menceritakan adanya pertanyaaan mengenai kelompok mahasiswa yang diikutinya.

Raka membantah anggapan tersebut dengan menegaskan bahwa dirinya merupakan wartawan.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam kejadian tersebut adalah permintaan untuk menghapus video yang direkam Raka

ACEH

Diduga Keracunan MBG, Siswa dan Guru SMP 4 Banda Aceh Dirawat

Oleh Van · 29 Okt, 20.14 WIB



Sejumlah Siswa

BANDA ACEH — Dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian setelah sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Banda Aceh dilaporkan mengalami gangguan kesehatan dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit (RS) Kesdam, Banda Aceh, Kamis, 29 Oktober 2026.

Insiden tersebut tidak hanya menimpa peserta didik. Sejumlah guru di sekolah itu juga dilaporkan mengalami gejala serupa setelah menyantap makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.

Berbagai informasi yang dihimpun mengenai adanya guru yang turut terdampak pada Kamis, 29 Oktober 2026. Namun, hingga informasi awal tersebut disampaikan, belum ada keterangan resmi

mengenai jumlah pasti korban maupun tingkat keparahan kondisi mereka.

Berdasarkan informasi awal, siswa dan guru mulai menunjukkan gejala yang diduga mengarah pada keracunan makanan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipasok oleh salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pihak sekolah kemudian membawa mereka ke RS Kesdam untuk mendapatkan penanganan medis. Rumah sakit tersebut disebut berjarak sekitar lima menit perjalanan kendaraan dari sekolah.

Meski para korban telah dibawa ke rumah sakit, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami siswa dan guru itu belum dapat dipastikan. Pemeriksaan medis serta penelusuran terhadap makanan yang dikonsumsi diperlukan

untuk memastikan apakah kejadian tersebut benar-benar disebabkan oleh menu MBG.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan insiden tersebut. Koordinator Wilayah BGN Banda Aceh, Fakhry, mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh sebelum menyampaikan keterangan lebih lanjut.

“Kami masih koordinasikan ke Sekda (Kota Banda Aceh),” ujar Fakhry, Kamis, 29 Oktober 2026.

Belum adanya keterangan resmi membuat sejumlah hal penting masih menunggu kejelasan, mulai dari jumlah korban, kondisi terkini siswa dan guru, identitas SPPG yang memasok makanan, hingga hasil pemeriksaan terhadap menu yang dikonsumsi.

Dalam penanganan dugaan keracunan pangan, BGN sebelumnya menyatakan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas. Lembaga tersebut juga menjelaskan bahwa laporan dugaan keracunan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sampel makanan, koordinasi dengan dinas kesehatan, dan investigasi untuk mengidentifikasi penyebab kejadian.

Karena itu, penanganan kasus di SMP 4 Banda Aceh perlu disertai pemeriksaan yang transparan dan berbasis bukti. Hasil penyelidikan nantinya penting untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah evaluasi terhadap penyediaan ...

ACEH

Pejabat Tinggi BNN RI Kunjungi Sabang, Wali Kota Dorong Penguatan Sinergi Berantas Narkoba

Oleh Redaksi · 29 Okt, 13.36 WIB



SABANG — Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam bersama Wakil Wali Kota Suradji Junus menyambut kedatangan Inspektur Utama BNN RI Irjen Pol. Dicky Kusumawardhana bersama rombongan pejabat tinggi Badan Narkotika Nasional (BNN) RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang, Kamis (29/10).

Penyambutan berlangsung di Pelabuhan Kapal Cepat Balohan dan turut dihadiri Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu serta Kepala BNNK Sabang Dahlia Sungkar.

Selain Inspektur Utama BNN RI, rombongan terdiri atas Plt. Deputy Pencegahan BNN RI Brigjen Pol. Tri Julianto Djatiutomo, Kepala Pusat Informasi dan Data BNN RI Brigjen Pol. Augustinus Berlianto Pangaribuan, serta Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani.

Wali Kota Sabang menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota Sabang dan BNN

dalam mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Pemerintah Kota Sabang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kolaborasi lintas instansi sangat penting untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya narkotika,” kata Zulkifli.

Wali Kota Sabang berharap kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga masyarakat Sabang dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sebagai bentuk keramahmatan Pemerintah Kota Sabang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota turut menjamu rombongan BNN RI beserta rombongan dalam jamuan makan siang di Pendopo Wali Kota Sabang.

Momen tersebut dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun hubungan baik antara pemerintah daerah dan jajaran BNN.[]

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ACEH

Pemko Sabang Terima Audiensi YARA, Bahas Rancangan Qanun Bantuan Hukum

Oleh Redaksi · 29 Okt, 13.49 WIB



BANDA ACEH, SABANG – Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam bersama Wakil Wali Kota Suradji Junus menerima audiensi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) untuk membahas rancangan Qanun Bantuan Hukum bagi masyarakat. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya menjajaki kebijakan daerah yang dapat memperkuat akses masyarakat terhadap pendampingan hukum.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Sabang dihadiri Ketua YARA Safaruddin, Gita Melisa selaku Notaris-PPAT sekaligus mitra kerja sama YARA, Yuni Eko Hariatna selaku Kepala Perwakilan YARA Banda Aceh dan Sabang, serta advokat YARA Teuku Raja Muda. Turut hadir sejumlah kepala perwakilan

YARA dari beberapa daerah di Aceh.

Dalam audiensi tersebut, Safaruddin memaparkan sejumlah program YARA yang mencakup penguatan akses bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, penyuluhan dan pendampingan hukum bagi aparatur gampong serta lembaga pendidikan, penguatan hukum adat, dan optimalisasi peran Baitul Mal Gampong. Program tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum melalui pendidikan advokat bagi generasi muda.

Selain bidang hukum, YARA turut menawarkan dukungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM dan optimalisasi cold storage di Ie

Meulee untuk mendukung sektor perikanan. Upaya lainnya mencakup perluasan akses informasi beasiswa kuliah gratis serta fasilitasi penyerapan lulusan SMK lokal melalui program kerja dan kemitraan strategis dengan Pemerintah Kota Sabang.

Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyambut baik inisiatif YARA, terutama program bantuan hukum bagi aparatur gampong yang dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan gampong.

“Alhamdulillah, kami menyambut baik dan berterima kasih kepada YARA atas berbagai program yang ditawarkan. Terutama bantuan hukum bagi keuchik, karena pemahaman dan pendampingan hukum sangat penting dalam menjalankan pemerintahan

gampong,” kata Zulkifli, Kamis (29/10).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Suradji Junus menyoroti pentingnya fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku UMKM agar produk lokal dapat berkembang dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Menurutnya, masih ada pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam pengurusan sertifikat halal, izin edar BPOM, perlindungan kekayaan intelektual, serta perizinan lainnya.

“Kami berharap YARA dapat membantu memfasilitasi pengurusan legalitas dan perizinan UMKM. Dengan terpenuhinya persyaratan tersebut, produk lokal dapat lebih berkembang dan masyarakat merasa aman saat menggunakan atau mengonsumsinya,” tambah Suradji.

ACEH

Posyandu Aceh Barat Bantu Anak Terdampak Bencana

Oleh Aceh Barat · 29 Okt, 16.55 WIB



Ketua Posyandu Kabupaten Aceh Barat, Afrinda Novalia, bersama DP3AKB menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada anak-anak terdampak bencana hidrometeorologi di SDN

MEULABOH - Ketua Posyandu Kabupaten Aceh Barat, Afrinda Novalia, S.E., M.M., bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyalurkan bantuan bagi anak-anak terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pante Ceureumen, Kamis (29/10/2026).

Bantuan diserahkan kepada siswa SDN Alue Lhok di Desa Jambak, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Bantuan berupa pakaian sekolah, sepatu, dan tas tersebut menyasar lima sekolah, yakni TK Jambak, SDS Sikundo, SDN Keutambang, SDN Alue Lhok, dan SMPN 3 Pante Ceureumen.

Afrinda mengatakan, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perempuan

dan anak yang terdampak bencana, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan psikososial mereka.

Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga terdampak dan membantu anak-anak kembali menjalani aktivitas pendidikan dengan lebih baik.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemulihan kehidupan keluarga terdampak bencana,” ujar Afrinda.

Afrinda juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kepedulian dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak pascabencana.[]

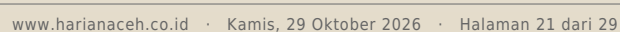
Editor: Biro Meulaboh

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



Oleh Redaksi · 29 Okt, 13.55 WIB



LINGKUNGAN

5 BERITA

LINGKUNGAN

Karhutla Terus Berulang, Kursi Jumhur Hidayat dan Raja Juli Antoni Digoyang

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.30 WIB



Aliansi Mahasiswa Merdeka meminta Presiden mengevaluasi sekaligus mengganti Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. FOTO/Net.

JAKARTA – Desakan perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto menguat.

Aliansi Mahasiswa Merdeka meminta Presiden mengevaluasi sekaligus mengganti Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang menjadi salah satu sorotan utama dalam tuntutan tersebut.

Desakan itu disampaikan menyusul aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Aksi tersebut mengangkat sejumlah persoalan, mulai dari krisis ekologis, kebijakan ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan kebebasan sipil.

Aliansi Mahasiswa Merdeka menilai evaluasi terhadap jajaran

kabinet perlu menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan.

Mereka meminta Presiden tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi mempertimbangkan pergantian pejabat apabila kinerja kementerian tidak memenuhi tanggung jawab yang diharapkan masyarakat.

Dalam tuntutan tertulisnya, aliansi secara khusus menyebut nama Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai pejabat yang perlu dievaluasi untuk diganti.

Karhutla Berulang, Pencegahan dan Penegakan Hukum Disorot

Karhutla menjadi persoalan serius karena dampaknya tidak hanya merusak kawasan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berpotensi

menimbulkan persoalan kesehatan dan kerugian ekonomi.

Kebakaran yang berulang juga menempatkan upaya pencegahan, pengawasan kawasan rawan, deteksi dini, dan kesiapsiagaan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah.

Penanganan tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan memadamkan api setelah kebakaran terjadi, tetapi juga dari efektivitas mencegah kebakaran meluas.

Aliansi Mahasiswa Merdeka mendesak agar persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi serius terhadap kementerian yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Menurut tuntutan aliansi, pemerintah perlu memastikan pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan berjalan efektif, termasuk terhadap wilayah konsesi perusahaan yang memiliki kewajiban

melakukan pencegahan serta pengendalian kebakaran.

Penegakan hukum juga menjadi perhatian. Perusahaan atau pihak lain yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum, sedangkan kewajiban pemulihan lingkungan perlu diawasi hingga benar-benar dilaksanakan.

Publik juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab, proses penanganan perkara, sanksi yang dijatuhkan, serta perkembangan pemulihan kawasan terdampak.

32 Perusahaan Dijatuhi Sanksi Administratif

Persoalan karhutla turut menjadi perhatian menyusul informasi penegakan hukum yang disampaikan Kementerian Kehutanan.

LINGKUNGAN

Polri Ungkap 245 Tersangka Karhutla, 5.859 Hektare Lahan Terbakar

Oleh Van · 29 Okt, 19.39 WIB



JAKARTA - Polri mencatat sebanyak 245 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia hingga akhir Oktober 2026.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam siaran langsung YouTube Polda Kalbar pada Kamis, (29/10/2026) menyebutkan penetapan tersangka tersebut berasal dari 287 laporan polisi yang ditangani jajaran kepolisian di sejumlah provinsi rawan karhutla.

"Terhadap pelaku perorangan itu, kami telah membuat 287 laporan polisi (LP) dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektar. Kemudian tersangka yang sudah kami tetapkan untuk pelaku perorangan dari seluruh polda-polda yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sebanyak 245 tersangka," kata Asep.

Asep menyebut penanganan perkara karhutla tersebut tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jambi hingga Lampung.

Dari sejumlah wilayah tersebut, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan polisi terbanyak. Polda Kalbar mena-

ngani 68 laporan polisi terkait karhutla.

"Kemudian Polda Riau sebanyak 59 laporan polisi, Polda Kalteng ada 43 laporan polisi, Polda Sumsel 42 laporan polisi, Polda Kaltim 30 laporan polisi," lanjutnya.

Menurut Asep, tingginya penanganan kasus di Kalimantan Barat menjadi salah satu alasan dirinya datang langsung ke wilayah tersebut atas perintah Kapolri.

"Kemudian wilayah yang paling banyak atau polda yang paling banyak membuat laporan polisi atau memproses tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, yaitu: Polda Kalbar sebanyak 68 laporan polisi, makanya kami langsung datang perintah Kapolri on the spot di wilayah Kalimantan Barat ini," papar Asep.

Polri juga mengungkap modus yang dilakukan para tersangka. Pembakaran lahan dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian ketika membuka lahan.

"Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka antara lain, baik secara sengaja ataupun lalainya untuk membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan kebakaran hutan," ungkapnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Satu Hari di Jakarta, Berbulan-bulan di Hutan: Soal Konsentrasi Kekuatan Negara

Oleh Syarifudin Brutu · 29 Okt, 14.52 WIB



Ilustrasi memperlihatkan kontras antara massa demonstran dan aparat di kota dengan hutan yang terbakar di Kalimantan. Di tengahnya, seorang pemuda berdiri menghadap dua realitas, sementara timbangan menjadi simbol pertanyaan tentang prioritas negara.

Pada 28 Oktober 2026, ribuan mahasiswa turun ke jalan di sekitar Gedung DPR dan Bundaran HI. Negara menjawabnya dengan 14.324 personel gabungan TNI, Polri, dan instansi terkait.

Titik dipetakan, tugas dibagi, jalur diatur, semuanya rampung dalam hitungan jam. Satu hal jelas dari sini: ketika negara mau, ia tahu persis cara memusatkan kekuatan.

Angka belasan ribu itu terasa akrab bagi yang mengikuti isu karhutla. TNI mengerahkan 14.258 personel untuk penanggulangan karhutla, sementara Polri menerjunkan ribuan personel di tujuh provinsi prioritas. Jumlahnya sama-sama belasan ribu. Bedanya, kekuatan itu tidak berkumpul di satu titik.

Ia tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan empat provinsi Kalimantan, mencakup pemadaman, patroli, pemantauan, pencegahan, hingga penanganan dampak.

Di Kalimantan Tengah saja, Satgas melibatkan sekitar 10.700 personel dari BPBD, kehutanan, pemadam, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat.

Karena itu, dua angka tersebut tidak bisa dibandingkan mentah-mentah. Pengamanan demo adalah kekuatan terkonsentrasi: ribuan orang di beberapa kilometer jalan, selama beberapa jam. Penanganan karhutla adalah kekuatan terdiluasi: ribuan orang di jutaan hektare lahan rawan, selama berminggu-minggu.

Kepadatan personel di Jakarta memang tidak akan pernah sama dengan di hamparan gambut, dan tidak perlu sama. Yang layak digugat bukan kesetaraan jumlah, melainkan kesetaraan kesungguhan.

Di sinilah pertanyaan publik menjadi sah: apakah kecepatan dan kerapian yang tampak di Jakarta juga hadir di lahan gambut? Jawabannya tidak meyakinkan. Di titik api, personel justru sempat dinilai kurang.

Mensesneg menyebut pasukan tambahan dari Jawa diperlukan karena kekuatan di Kalimantan masih terbatas, dan Presiden mengerahkan sekitar 1.200 prajurit TNI tambahan. Bantuan itu tentu diperlukan, tetapi ia datang setelah kekurangan terasa. Itu ciri

penanganan yang memadamkan, bukan mencegah.

Lebih jauh, mengerahkan banyak orang tidak otomatis memadamkan api. Kebakaran gambut menjalar di bawah permukaan dan tidak bisa ditaklukkan hanya dengan semangat dan seragam. Ia butuh peralatan. Pemerintah mengaku menambah 17 pesawat water bombing, 1.500 personel, dan 200 pompa beserta pipa untuk pemadaman di lahan gambut.

Namun Pemprov Kalimantan Tengah masih meminta tambahan helikopter dan menyebut masih butuh sekitar 100 hingga 200 pompa air. Ada selisih antara yang dibutuhkan dan yang tersedia, dan selisih itu dibayar dengan lahan yang terus terbakar.

LINGKUNGAN

Raja Juli Antoni Batal Bahas Karhutla di DPR

Oleh Redaksi · 29 Okt, 14.01 WIB



BANDA ACEH -Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang dijadwalkan pada Kamis, 29 Oktober 2026, batal digelar.

“Iya betul (batal),” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis saat dikonfirmasi RMOL sesaat lalu.

Adapun Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menhut Raja Juli Antoni tersebut diagendakan membahas perkembangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026.

Kendati demikian, Abdul Kharis memastikan bahwa rapat bersama Menhut Raja Juli Antoni akan dijadwalkan ulang pada masa sidang berikutnya. Mengingat, saat ini DPR masih memasuki masa reses.

“Kemungkinan kalau masuk masa sidang,” kata politikus PKS ini.

Berdasarkan data BNPB, luas Karhutla dilaporkan mencapai 639,23 hektare. Setidaknya, Kar-

hutla terjadi di tujuh provinsi, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Riau.

Pemerintah pusat sendiri telah menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp1,235 triliun kepada tujuh provinsi yang terdampak Karhutla.

Selain pemerintah provinsi, bantuan juga diberikan kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak Karhutla di wilayah tersebut.

Adapun bantuan telah disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 7 September 2026 dan 22 Oktober 2026, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam keterangannya, dikutip Jumat, 23 Oktober 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



LINGKUNGAN

Mencekam! Puting Beliung Terjang 4 Kecamatan di Jombang, Ratusan Rumah Rusak

Oleh Redaksi · 29 Okt, 10.24 WIB



Bencana angin puting beliung menerjang kawasan pemukiman warga empat kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Peristiwa yang terjadi pada Rabu (28/10/2026) petang. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Bencana angin puting beliung menerjang kawasan pemukiman warga empat kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Peristiwa yang terjadi pada Rabu (28/10/2026) petang itu, mengakibatkan ratusan rumah rusak parah hingga sebagian di antaranya roboh rata dengan tanah.

Kerusakan paling parah salah satunya terjadi di Desa Kampungbaru, Kecamatan Plandaan. Rumah milik nenek Timah (60) ambruk total diterjang angin kencang.

Nahas, korban mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan rumahnya yang runtuh. Karena tempat tinggalnya sudah tidak dapat dihuni kembali,

korban kini terpaksa diungsikan ke rumah anaknya.

Bencana angin puting beliung juga merusak sejumlah tempat usaha dan fasilitas publik di Desa Kampungbaru. Atap-atap toko milik warga berterbangan porak-poranda, sementara tower jaringan komunikasi serta papan reklame milik kantor desa setempat roboh dihentak angin.

Warga Kampungbaru, Iswanto, menceritakan detik-detik mencekam saat angin puting beliung datang menerjang pemukimannya pada petang hari.

"Awalnya langit di atas desa mendadak gelap gulita. Hanya selang beberapa saat, tiba-tiba muncul angin yang sangat kencang dan langsung menyapu rumah-rumah warga serta Kantor Desa

Kampungbaru," ujar Iswanto di lokasi kejadian.

Berdasarkan data sementara di lapangan, terjangan angin puting beliung tidak hanya melanda Desa Kampungbaru di Kecamatan Plandaan, tetapi juga menyapu puluhan desa yang tersebar di tiga kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Kudu, Kecamatan Kabuh, dan Kecamatan Ngusikan.

Saat ini warga terdampak bergotong-royong membersihkan puing-puing bangunan yang tersisa.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan instansi terkait segera turun tangan memberikan bantuan perbaikan untuk rumah-rumah warga yang rusak.

BERITA

Тауфік Мухаммад

Data DIU mengungkap, sejak pecahnya perang melawan Rusia pada Februari 2022, hampir 46.000 tentara bayaran dari 151 negara dan wilayah menandatangani kontrak dengan militer Rusia

A photograph of three men seated on a stage for a panel discussion. The man on the left wears a red batik shirt and glasses. The man in the center, wearing a white shirt, is speaking into a microphone. The man on the right wears a black jacket. They are seated behind a long wooden table with water bottles and glasses. The background features a large green door. The foreground shows the backs of the audience members' heads.

Acara dialog tersebut juga dihadiri Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan DPP PDIP.

新加坡剑桥普通教育文凭试

SIJIL AM PELAJARAN SINGAPURA - CAMBRIDGE (PERINGKAT BIASA)

சிங்கப்பூர்-கேம்பிரிட்ஜ் பொதுக் கல்வியின் எல்வந்திழை (சாதாரண நிலை)

This certifies that the candidate named below sat the Singapore-Cambridge GCE Ordinary Level Examination, conducted by the Singapore Ministry of Education, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate and the Singapore Examinations and Assessment Board, and obtained the following results:

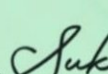
CANDIDATE	YEAR OF EXAM	SEX	
GIBAN RAKASUMING RAKA	2014	2014	
SCHOOL	INDEX NO	YEAR OF EXAM	
ORCHARD PARK SECONDARY SCHOOL	2014	2014	
SUBJECT	GRADE	LANGUAGE MEDIUM	EXAMINING AUTHORITY
ENGLISH LANGUAGE	A	ENGLISH	CAMBRIDGE
COMBINED HUMANITIES	B	ENGLISH	CAMBRIDGE
MATHEMATICS	C	ENGLISH	CAMBRIDGE
SCIENCE (PHYSICS)	B	ENGLISH	CAMBRIDGE
ART & DESIGN	B	ENGLISH	CAMBRIDGE
MALAY	B	MALAY	SINGAPORE
MALAY (ORAL/KURAL)	B	MALAY	SINGAPORE

VIDIO

1. English Language (Bahasa Inggris): E
2. Combined Humanities: B
3. Mathematics (Matematika): C
4. Science (Physics/Chemistry): B
5. Art and Design: B
6. Malay (Bahasa Melayu): B



Bank Aceh



Selamat dan Sukses

ATAS PELANTIKAN DAN SERTIJAB

BRIGJEN TNI MAHESA FITRIADI, S.A.P., M.M.

Sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda



Oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat
JENDERAL TNI TANDYO BUDI REVITA

di Gedung AH Nasution,
Markas Besar TNI Angkatan Darat,
Jakarta Pusat,
pada hari Jumat, 16 Oktober 2026

Semoga dalam melaksanakan tugas
selalu mendapat rahmat dan petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dan Terima Kasih Kepada
MAYJEN TNI JOKO HADI SUSILO, S.I.P.
Atas pengabdiannya selama ini

Tertanda,

FADHIL ILYAS
Direktur Utama

www.bankaceh.co.id T. 051 2500000

Bank Aceh Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS

OPINI

Clandestine Laboratory Narkoba di Pidie: Ujian Kewaspadaan Negara di Gerbang Selat Malaka

Oleh Aisyah Karim · 29 Okt, 06.00 WIB



Officers of the National Narcotics Agency stands near packages of ketamine seized from the Mongolian-flagged tanker MT Global 168, during a press conference in Belawan, North Sumatra, Indonesia, Friday, Oct. 23, 2026. (AP Photo/Binsar Bakkara)

IM gabungan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Rabu (21/10/2026) berhasil membongkar salah satu clandestine lab terbesar di Indonesia.

Laboratorium gelap ini berwujud dua unit rumah toko di Desa Beureueh Dua Jalan Piren Kem-bang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh.

Sekitar 1,2 ton sabu (termasuk 20 drum sabu cair/meth oil dan sekitar 500 kg sabu kristal), serta berbagai peralatan pengolahan telah disita petugas di lokasi.

Setidaknya 11 orang ditangkap, terdiri dari 2 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berinisial LH dan XM, diduga berperan sebagai ahli kimia.

Sisanya 9 warga lokal. Sedang-kan penyandang dana dan pengendali laboratorium (JM) masih diburu petugas.

Kasus ini berdekatan dengan penyitaan 58 karung seberat 1.16 ton ketamin hidroklorida dengan nilai sekitar Rp 3,48 triliun (US\$210 juta) dari kapal tanker MT Global 168 yang terpantau berada di Selat Malaka dan Laut Andaman.

Pada 20 Oktober 2026 petugas intelijen mendeteksi kejanggalan pada rute pelayaran lalu mengarahkan tim gabungan untuk men-cegat kapal tersebut di perairan dekat Tanjung Balai Asahan, kemudian mengawalnya menuju Pelabuhan Belawan. Polisi menangkap 8 awak kapal, yang

terdiri dari 7 warga lokal dan seorang warga negara Taiwan.

Laman apnews.com pada 23 Oktober 2026 melaporkan penyelidik meyakini laboratorium ini terkait dengan jaringan perdagangan narkoba internasional.

Saat ini, pihak kepolisian sedang mendalami kemungkinan adanya hubungan dengan sindikat di Tiongkok, Malaysia dan Indonesia, serta kelompok kriminal di kawasan “Segitiga Emas” (golden triangle) Asia Tenggara, wilayah yang sejak lama dikenal sebagai pusat produksi dan perdagangan narkoba skala besar.

Laboratorium gelap di Pidie telah membunyikan alarm keamanan negara.

Saat ini Aceh tidak hanya dimanfaatkan sebagai lokasi tran-

sit namun telah berkembang menjadi lokasi pengolahan narkotika.

Meski kedua kasus ini belum terbukti berada dalam satu jaringan, namun keduanya memperlihatkan pentingnya menguji kere-n-tanan jalur maritim Indonesia terhadap perdagangan narkotika lintas negara.

Geopolitik Aceh: Tantangan Keamanan Maritim

Aceh menempati posisi geografis yang penting di ujung barat laut Pulau Sumatra.

Wilayah ini berbatasan dengan Selat Malaka di sisi timur dan bagian utara, Laut Andaman di bagian utara, serta Samudra Hindia di bagian barat dan selatan.

EDUKASI

MBG Diusulkan Masuk Kurikulum Sekolah, Kepala BGN Ungkap Materi yang Bakal Dipelajari Siswa

Oleh Van · 29 Okt, 21.42 WIB



Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan alasan mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan gizi masuk ke dalam kurikulum sekolah. Usulan tersebut bertujuan agar siswa memahami manfaat makanan bergizi, mulai dari karbohidrat, protein hewani, hingga sayuran. Sudaryono dalam keterangan resminya pada Kamis, (29/10/2026) menjelaskan pendidikan gizi yang diusulkan tidak dimaksudkan untuk mengganggu jam pelajaran.

Materi tersebut dapat diberikan pada waktu khusus ketika siswa menyantap menu MBG di sekolah.

"Mungkin sekarang lagi ramai, Kepala BGN minta MBG dan pendidikan gizi masuk kurikulum misalnya, itu maksudnya adalah menjadi satu kesatuan dari unsur pendidikan kita. Dikasih waktu khusus di dalam, jadi tidak mengganggu jam pelajaran," kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, program tersebut dapat menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengenal kandungan makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Dengan demikian, kegiatan makan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga

menjadi sarana pembelajaran mengenai gizi.

Siswa Belajar Fungsi Protein hingga Sayuran

Sudaryono menjelaskan, pelaksanaan pendidikan gizi dapat menyesuaikan jadwal kepulangan siswa.

Untuk siswa sekolah dasar kelas I dan II yang pulang pagi, kegiatan makan MBG dapat dilakukan sebelum mereka meninggalkan sekolah.

Sementara itu, siswa yang pulang siang dapat memperoleh waktu makan pada pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Dalam waktu tersebut, siswa juga bisa mendapatkan penjelasan mengenai fungsi berbagai jenis makanan.

"Tidak salah, keputusannya adalah untuk anak SD kelas I, kelas II yang pulang pagi, itu sebelum pulang sekolah jam 10.00 dia makan," paparnya.

"Untuk yang pulang siang, itu diberikan waktu jam 12.00 sampai dengan jam 13.00, 1 jam itu makan MBG sambil diberi pencerahan terkait kenapa kok harus makan karbo, kenapa kok harus makan protein hewani, apa fungsi protein hewani, kenapa harus makan protein hewani, kenapa harus makan sayur," tuturnya.(*)

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



TEKNOLOGI

Tantangan Mengelola Banyak Cabang tanpa Sistem ERP yang Mumpuni

Oleh Redaksi · 29 Okt, 16.06 WIB



BANDA ACEH - Membuka cabang baru memberi perusahaan peluang menjangkau lebih banyak pelanggan.

Namun, setiap cabang juga menambah proses yang harus dikoordinasikan: menerima pesanan, melakukan pembelian, menyetujui pengeluaran, melayani pelanggan, dan melaporkan hasil kerja.

Ketika tiap lokasi menjalankan proses tersebut dengan cara berbeda, kantor pusat akan semakin sulit melihat kondisi bisnis secara utuh.

Perbedaan kecil mungkin belum terasa saat jumlah cabang masih sedikit.

Menurut data Internal HashMicro, terdapat perusahaan menyatukan 10 sistem ERP di 12 negara dan meningkatkan otomatisasi pesanan penjualan di salah satu negara dari 18% menjadi 42%.

Seiring pertumbuhan, cara kerja yang tidak seragam dapat memperlambat koordinasi dan membuat hasil antar-cabang sulit dibandingkan.

Proses yang berbeda menghasilkan data yang sulit dibandingkan

Satu cabang mungkin mencatat pesanan segera setelah diterima, sementara cabang lain baru memasukkannya ketika barang dikirim.

Ada pula cabang yang memakai kategori layanan atau alasan pembatalan yang berbeda.

Saat data digabungkan, laporan dapat terlihat rapi tetapi tidak selalu menggambarkan kegiatan yang sama.

Akibatnya, manajemen memerlukan waktu tambahan untuk memastikan arti setiap angka sebelum mengambil keputusan.

Perusahaan pun sulit mengetahui apakah perbedaan kinerja

berasal dari kondisi pasar, kapasitas tim, atau sekadar perbedaan cara pencatatan.

Standarisasi tidak berarti setiap cabang harus mengabaikan kebutuhan lokal.

Yang perlu diseragamkan adalah proses inti dan definisi data, sehingga pengecualian dapat terlihat dan dijelaskan.

Persetujuan dan koordinasi semakin sulit diikuti

Tanpa alur kerja bersama, keputusan sehari-hari kerap berpindah melalui pesan pribadi, email, atau dokumen terpisah.

Permintaan pembelian dari cabang, misalnya, bisa menunggu karena tidak jelas siapa yang berwenang menyetujuinya.

Ketika penanggung jawab berganti, riwayat keputusan juga sulit ditelusuri.

Hambatan serupa muncul dalam pelayanan pelanggan. Tim penjual

lan dapat menjanjikan waktu penyelesaian tanpa mengetahui kapasitas operasional cabang.

Kantor pusat mungkin baru melihat masalah setelah keluhan meningkat.

Semakin banyak cabang, semakin besar usaha yang dibutuhkan untuk menyatukan informasi tersebut secara manual.

Pertumbuhan cabang membutuhkan standar yang dapat dijalankan

Perusahaan perlu menetapkan kapan suatu transaksi dicatat, siapa yang menyetujui tiap jenis permintaan, dan informasi apa yang wajib tersedia sebelum pekerjaan diteruskan ke tim lain.

Standar tersebut harus cukup jelas untuk diikuti cabang baru, tetapi tetap menyediakan mekanisme pengecualian ketika kondisi setempat memang berbeda.

SPORT

Prabowo Beri Bonus Rp3 Miliar untuk Atlet Peraih Emas Asian Games dan Asian Para Games

Oleh Redaksi · 29 Okt, 19.52 WIB



BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto memberikan bonus Rp3 miliar kepada atlet peraih medali emas Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Bonus diserahkan langsung oleh Prabowo kepada para atlet Asian Games dan Asian Para Games di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan, besaran bonus atlet disesuaikan dengan kategori pertandingan. Atlet peraih emas nomor ganda atau berpasangan mendapat Rp2,4 miliar, sedangkan peraih emas nomor beregu memperoleh Rp1,5 miliar.

“Apresiasi langsung beliau berikan dengan langsung menyerahkan bonus sebesar Rp3 miliar untuk peraih medali emas. Tetapi untuk tentu kalau yang ganda atau yang berdua itu nilainya 2,4 dan kalau yang beregu nilainya 1,5 miliar,” kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (29/10/2026),

Erick mengapresiasi peningkatan bonus tersebut karena dinilai dapat membantu masa depan atlet. Dia berharap penghargaan itu sekaligus menghapus anggapan bahwa karier atlet tidak menjanjikan setelah mereka berhenti bertanding.

“Ini hal yang luar biasa. Saya rasa stigma-stigma bahwa masa depan atlet itu suram tidak benar, ya,” ujarnya.

Menurut Erick, Prabowo memandang profesi atlet sebagai karier yang membanggakan karena kontribusinya tidak hanya mengharumkan nama keluarga, tetapi juga bangsa Indonesia.

“Bapak Presiden menyampaikan ini justru bagian membangun karakter bangsa, membuka lapangan pekerjaan, dan Bapak Presiden tadi menekankan juga akan terus membangun keolahragaan berkelanjutan di sekolah-sekolah,” kata Erick.

Dia menambahkan, penguatan olahraga sejak usia sekolah menjadi bagian penting untuk menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi masa depan.

“Nah, ini saya rasa pesan yang baik karena kita tahu anak muda Indonesia adalah masa depan bangsa yang perlu diperkuat untuk menjalin tentu kekuatan bangsa di masa yang akan datang,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Indonesia menutup Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan raihan 39 medali, terdiri atas lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Capaian tersebut melampaui target empat medali emas dan menempatkan Indonesia di posisi ke-16 klasemen akhir.

Sementara itu, Indonesia meraih 73 medali pada Asian Para Games 2026. Kontingen Merah Putih mengoleksi 15 emas, 21 perak, dan 37 perunggu, sekaligus menempati peringkat kedelapan klasemen perolehan medali

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Insentif Fiskal Bukti Peran Negara, Yakin?

Oleh Rut sw · 29 Okt, 12.20 WIB



Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG). FOTO/Net.

ROGRAM prioritas presiden terus bergulir, itulah Makan Siang Bergizi Gratis, angka keracunan usai menyantap menu hari itu tak membuat langkah tercegah, paling tidak melakukan muhasabah atau evaluasi.

Lebih baik lagi jika dihentikan total.

Sebagaimana gugatan koalisi masyarakat sipil dan peneliti dari CELIOS (Center of Economic and Law Studies). Dan mereka terpaksa kecewa karena putusan tidak menggunakan anggaran pendidikan baru akan diterapkan tahun 2028.

Kesehatan generasi dipertaruhkan, pagi datang ke sekolah sehat, bisa jadi seusai menyantap menu MBG keracunan, polanya terus berulang, tak ada pertanggungjawaban memadai, siapa yang dihukum pun tidak ada.

Malah gebrakan BGN dan pemerintah ada-ada saja. Setelah pengadaan motor listrik, kepala BGN mengusulkan MBG masuk kurikulum sekolah, sebagaimana pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (penjaskes).

Tujuannya agar siswa tidak hanya menerima makanan gratis, tetapi juga memahami pentingnya asupan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

Yang terbaru, masih dalam rangka mendukung program MBG, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, pihaknya mengalokasikan Rp 1 triliun sebagai insentif fiskal kepada daerah-daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota yang menyukseskan program MBG.

Suksesnya pelaksanaan program MBG, kata Tito, akan menjadi

salah satu indikator pemerintah daerah yang berprestasi.

Ringkasnya, bentuknya pertandingan dalam tiga gelombang, enam region.

Skema tersebut akan dilaksanakan tahun depan dan dipertandingkan bagi kepala daerah yang paling kreatif menyukseskan program MBG.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya Kemendagri untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah menyukseskan program MBG.

Menkeu Suahasil Nazara, kata Tito, juga telah menyetujui penyisipan anggaran untuk pemberian insentif fiskal tersebut.

Sebelumnya, para kepala daerah sudah diberi tenggat satu Minggu untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG.

Bagi pemda yang tidak memenuhi batas waktu tersebut akan

mendapat surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Satgas MBG di daerah yang dibentuk Kemendagri sudah ada di 230 daerah, kebijakan ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.

Anggota Satgas MBG ini terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membina kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan, serta unsur inspektorat.

Satgas MBG bersama unsur BGN memiliki tugas menginspeksi Satuan SPPG berdasarkan 14 indikator kelayakan operasional, termasuk kualitas dan menu makanan ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



ISLAM

Narkoba Dalam Kacamata Siyasah Syar`iyyah: Menutup Pintu Bukan Sekadar Menangkap Pelaku

Oleh Aisyah Karim · 29 Okt, 13.05 WIB



EPALA BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dedi Tabrani menyampaikan kepada media di Banda Aceh pada Rabu (28/10/2026) bahwa penguatan qanun Aceh tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi prioritas. Tujuannya menghadapi peredaran gelap narkotika sekaligus memperluas akses rehabilitasi bagi para pengguna. Qanun tersebut diharapkan memperjelas pembagian peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam menangani narkotika. Qanun juga perlu menjamin akses rehabilitasi bagi pengguna yang membutuhkan pemulihan, sekaligus memperkuat penindakan terhadap jaringan peredaran.

Namun, qanun jinayat Aceh belum mengatur narkotika secara langsung. Qanun Jinayat (Qanun Aceh No. 6/2014) memuat sepuluh jarimah, antara lain khalwat, maisir, zina, liwath, musahaqah, dan ikhtilat. Khamar di dalamnya didefinisikan sebagai minuman yang memabukkan, sehingga yang diatur adalah cairan, bukan zat padat atau sintetis seperti sabu dan ganja. Narkotika diatur dalam UU No. 35/2009 yang berlaku nasional dan ditangani oleh BNN, Polri, dan Bea Cukai. Selain itu, peredaran narkotika di Aceh tersambung dengan jalur lintas negara. Karena kejahatan ini bersifat sistemik, ia perlu dilihat dari sudut pandang ideologis, dan regulasi setingkat qanun tidak optimal untuk mengaturnya.

Narkotika lahir, tumbuh, dan membesar karena ada pihak yang menerima manfaat dan keuntungan. Di beberapa negara, bahkan, narkotika berkelindan di balik kekuasaan. Kejahatan narkotika kini lebih tepat dipahami sebagai ekosistem ekonomi-politik, bukan sekadar kriminalitas individual, meski tidak semua jaringan narkotika disokong kekuasaan. Ia bertahan karena keuntungannya sangat besar, risikonya bisa “dibeli”, dan banyak pihak di berbagai level tidak punya alasan untuk menghentikannya. Selama keuntungan dan perlindungan itu ada, menangkap pengedar hanya akan membuat posisinya digantikan orang lain. Contohnya kasus mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy

Minahasa. Majelis hakim PN Jakarta Barat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dalam kasus peredaran sabu pada Mei 2023, dan kasasi Mahkamah Agung kemudian menguatkannya. Menurut dakwaan, ia memerintahkan bawahannya menukar lima kilogram sabu barang bukti dengan tawas, lalu sabu itu dibawa ke Jakarta untuk dijual. Teddy menyangkal dakwaan tersebut, tetapi pengadilan di semua tingkat menolak pembelaannya. Di Suriah pada masa pemerintahan Assad, narkotika dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk menyokong kekuasaan. Selama bertahun-tahun Suriah memproduksi mayoritas Captagon dunia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web



REDAKSI

PENERBIT	PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI	Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA	Adam
REDAKTUR	Hayat
SEKRETARIS REDAKSI	Ola
Jurnalis	
Banda Aceh:	
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR	12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani	
Bireuen:	
1. M. Ilham Sakubat	
Lhokseumawe:	
1. Yoppi	
Aceh Barat:	
1. Kurniawan	
Jawa Timur:	
1. Rut Sriwahyuni	
Fotografer:	
1. Mishabul Amin	
2. Nazaruddin	
Social Media Manager:	
1. Syukur M. Amin	